

**PANDANGAN MASYARAKAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TERHADAP KEBERADAAN MADRASAH SWASTA**

TESIS

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelara Magister dalam Manajemen
Pendidikan Islam**



Oleh
AHMAD ARIF RAMLI
NIM. 0805 S2 856

Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau
2011 M/ 1432 H

ABSTRAK

Ahmad Arif Ramli; *PANDANGAN MASYARAKAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG KEBERADAAN MADRASAH SWASTA*, PPs. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Ketika madrasah sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, madrasah secara keseluruhan tidak bisa mengisolasi diri dari perubahan-perubahan paradigma, konsep, visi dan orientasi baru pengembangan pendidikan nasional. Artinya pengembangan madrasah harus berkilat pada konteks perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat baik pada tataran konsep maupun paradigma masyarakat pemakainya, maka seharusnya pengembangan madrasah sudah harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. UU Nomor 16 Tahun 2001 memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengelola lembaga pendidikan termasuk madrasah-madrasah swasta yang sekarang keberadaannya lebih banyak dari madrasah negeri, tentunya dengan adanya yayasan yang memberikan perlindungan terhadap madrasah swasta ini keberadaannya akan lebih terarah sesuai dengan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu perlu diketahui pandangan masyarakat Indragiri Hulu terhadap keberadaan madrasah dan pemahaman masyarakat terhadap UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang mengelola madrasah swasta di Kabupaten Indragiri Hulu.

Penelitian ini mengetahui pandangan masyarakat Indragiri Hulu terhadap keberadaan madrasah swasta yang notabene milik masyarakat melalui yayasan-yayasan yang ada dalam masyarakat itu sendiri serta fungsi yayasan dalam mengelola lembaga pendidikan tersebut.

Dalam penelitian ini dikemukakan pendekatan secara kualitatif deskriptif dengan objek penelitian Madrasah dan masyarakat serta yayasan sebagai pelindung. Pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, wawancara, penyebaran angket dan kajian dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis deskriptif kemudian dideskripsikan sesuai dengan komponen yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan pandangan masyarakat terhadap keberadaan madrasah swasta sangat lemah. Ini ditandai dengan kurangnya minat orang tua memasukan anaknya ke madrasah tersebut, begitu juga dengan fungsi yayasan yang belum optimal melaksanakan kewajibannya sebagai pengayom dan penanggung jawab.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keinginan masyarakat terhadap keberadaan sekolah agama khususnya madrasah swasta ini cukup baik. Oleh karena itu masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu mengharapkan kepada Yayasan-yayasan yang mengelola pendidikan madrasah swasta benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penanggung jawab dengan jalan membenahi yayasan-yayasan yang sudah ada dan memberikan pengetahuan kepada pengurus yayasan tentang tanggung jawab yayasan terhadap madrasah yang dibinanya dan dikelola dengan menguasai manajemen pendidikan serta pengembangan ekonomi pendidikan untuk menunjang eksistensi dibidang keuangan. Di samping itu juga, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesamaan pendidikan di madrasah dengan di sekolah umum yang sudah diatur dengan UU No. 20 tahun 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
ABSTRAKSI	i	
KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI	vi	
BAB I. PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1	
B. Identifikasi Masalah	10	
C. Batasan Masalah	11	
D. Rumusan Masalah	11	
E. Penegasan Istilah	11	
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14	
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....		16
BAB III. METODE PENELITIAN		
A. Pendekatan Penelitian	27	
a. Jenis Penelitian	27	
b. Subjek Penelitian	27	
c. Populasi dan Sampel	28	
d. Pendekatan Penelitian.....	29	
e. Teknik Pengumpulan Data	29	
B. Metode Analisa Data	31	

BAB IV. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MADRASAH	
A. Perkembangan Madrasah	32
B. Perkembangan Madrasah Di Indragiri Hulu.....	39
C. Peran Yayasan sebagai Pelindung Madrasah Swasta di Kabupaten Indragiri Hulu	44
BAB V. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Pembahasan	54
B. Analisis Hasil Penelitian	73
1. Pandangan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu tentang Keberadaan Madrasah Swasta.....	74
2. Pandangan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Reposisi Madrasah Swasta.....	77
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran-Saran	98
C. Penutup	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah panjang madrasah sejak mulai dikenal kalangan muslim Indonesia telah menjadikan lembaga pendidikan ini tumbuh dengan karakteristik yang membedakan dirinya dari sekolah. Motivasi utama pembentukan madrasah lebih diwarnai oleh kebutuhan memenuhi kewajiban menuntut ilmu, khususnya ilmu agama bagi generasi penerus, dari pada oleh kebutuhan menyiapkan tenaga terampil pada bidang-bidang kerja tertentu.

Artinya, secara spesifik madrasah dibangun oleh individu atau masyarakat muslim sebagai wujud kesadaran keberagaman masyarakat muslim terhadap pentingnya pemahaman sekaligus pelestarian ajaran agama (*Tafaqquh fi al-din*) kepada anak-anak generasi penerus, khususnya bentuk ajakan untuk mengikuti agama Allah sebagaimana termaktub pada surat *At-Taubah ayat 122* :



Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Q.S. : at- Taubah 122).¹

Demikian itulah yang di pahami sebagai jati diri madrasah, dan hal itu tidak semata-mata mencakup jati dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga mencakup jati diri Islam dan jati diri umat Islam. Kata *Tafaqquh fi al-din* menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah* mengandung makna (*memperdalam pengetahuan Agama*) lebih lanjut ayat ini menggarisbawahi terlebih dahulu motivasi *bertafaqquh/* memperdalam pengetahuan bagi mereka yang dianjurkan keluar, sedang motivasi utama mereka yang berperang bukanlah *tafaqquh*, Ayat ini tidak berkata bahwa *hendaklah jika mereka pulang mereka bertafaqquh, tetapi berkata "untuk memberi peringatan kepada kaum mereka apabila mereka telah kembali kepada mereka supaya mereka berhati-hati."*²

Dengan demikian, bangunan personifikasi madrasah tidaklah sederhana, sebab pendiriannya didorong oleh semangat dan cita-cita luhur masyarakat. Dan dalam hal ini, Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikan menuju pada kesempurnaan.

Akan tetapi dalam perkembangannya dikemudian hari, lembaga pendidikan ini telah mengalami proses modernisasi yang berlangsung secara terus menerus. Nampaknya, ada pergeseran paradigma yang tidak dapat dihindari dikalangan masyarakat madrasah, terutama dalam kerangka memenuhi kebutuhan dan tuntutan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Asy – Syifa' Semarang, 2001, Hal. 433..

² .Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2002 Hal. 291.

perubahan kehidupan masyarakat di era global. Secara perlahan namun pasti, madrasah berupaya mengadaptasi tuntutan tersebut.

Dalam hal ini peran aktif masyarakat dan pemerintah di dalamnya merupakan faktor yang sangat penting. Dapat dicatat misalnya, tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Badan Pekerja KNIP melalui pengumuman No.15 Tahun 1945 tanggal 22 Desember 1945 merekomendasikan agar pemerintah RI memajukan madrasah, meski pada prakteknya, pemerintah sendiri lebih mengutamakan pengembangan sistem sekolah sebuah model pendidikan warisan Kolonial Belanda.³

Persoalannya, modernisasi madrasah meskipun telah berlangsung puluhan tahun belum juga mampu menghantarkan madrasah pada gerbang perubahan yang signifikan, misalnya dibandingkan dengan sekolah umum lainnya, malah hingga kini kesan stigmatik itu tak juga hilang, manakala menyebut madrasah, maka yang tergambar adalah sekolah yang kurang maju dan sangat lamban. Sebagai bukti yang paling gamblang, seiring dengan upaya di atas, internal madrasah sendiri pada kenyataannya tetap menyisakan kerumitan persoalan yang membenang kusut, mulai dari dana minim, manajemen apa adanya, sarana dan prasarana tidak mencukupi dan lain sebagainya.

Kemudian, dengan terbitnya surat keputusan bersama antara menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menteri Agama dan Menteri dalam negeri pada tahun 1975, madrasah mengalami perubahan yang signifikan terutama aspek kurikulumnya.

³ Nunu Ahmad An Nahidl, *.Posisi Madrasah*, GP Press, Jakarta, 2007, Hal. 3.

Pada tahun 1990-an madrasah berubah menjadi sekolah umum yang berciri khas agama. Kini dalam perspektif perundang-undangan madrasah dipandang sebagai suatu pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Posisi Madrasah ini diperkuat dengan keluarnya UU No. 20/2003 bab VI Pasal 17 dan 18, *jenis pendidikan umum jenjang pendidikan dasar adalah SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat, serta SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat, sedangkan pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.*⁴

Perkembangan madrasah yang demikian ini menunjukkan bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan yang dinamis dalam merespon tuntutan dan perkembangan masyarakat. Sebagai lembaga milik masyarakat mengingat mayoritas madrasah adalah swasta, madrasah tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus memenuhi kebutuhan masyarakat, jika tidak, maka madrasah tersebut akan ditinggalkan oleh masyarakat.

Pada saat ini masyarakat menaruh harapan besar terhadap madrasah. Tidak hanya pendidikan Agama Islam yang mereka harapkan dari madrasah, tetapi juga pendidikan umum. Dalam kehidupan yang sulit madrasah juga diharapkan membekali alumninya dengan pengetahuan umum dan kecakapan hidup, disamping pengetahuan dan ajaran agama yang terinternalisasi dengan baik. Dengan kata lain lulusan madrasah tidak hanya ilmu agamanya mendalam dan prilakunya agamis akan

⁴ UU Nomor 20 Tahun 2003 *Sistem Pendidikan Nasional*, Bening, Jogjakarta, 2010, Hal. 24.

tetapi mereka juga mempunyai wawasan luas serta mempunyai kompetensi dalam bidang sains dan teknologi.

Dilihat dari segi kondisi sosial ekonomi, sangat wajar jika masyarakat menaruh perhatian pada madrasah karena segmen dasar madrasah adalah mereka yang mempunyai status sosial ekonominya menengah ke bawah karena itu mereka juga mengharapkan madrasah bisa menjadi tangga mobilitas baik sosial maupun ekonomi.

Untuk merealisasikan semuanya itu peranan masyarakat sangatlah diharapkan hal ini dikarenakan sebahagian besar madrasah adalah swasta dukungan moral dan material dari masyarakat akan menjadikan lembaga pendidikan ini akan tampil bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya.

Faktor sosial yang mempengaruhi Badan Pendidikan dan Satuan Pendidikan adalah kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup masyarakat. Sedangkan yang berkaitan dengan lingkungan eksternal institusi pendidikan adalah hal-hal yang berkembang dari pengaruh Kultural Ekologi, Demografi, Ekonomi, Agama, Politik dan Etnik. Jika sikap sosial berubah, maka berubah pulalah tuntutan masyarakat akan kualitas pendidikan, karena kekuatan masyarakat bersifat dinamik sebagai akibat dari upaya masyarakat untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan.

Apabila partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam menentukan arah bersama mengenai penyelenggaraan program dan mutu pendidikan, maka hal pertama yang

dilakukan adalah mengajak kerja sama dengan masyarakat lingkungan di mana pendidikan itu berada.⁵

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 penjelasan pasal 8 “Kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang cukup luas termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan”.⁶

Oleh karena itu yayasan memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengembangan lembaga pendidikan terutama madrasah karena undang-undang ini memberikan kekuatan hukum bagi pelaku dalam melaksanakan kegiatan.

Hanya saja pemenuhan tuntutan- tuntutan tersebut bagi madrasah tidaklah sederhana mengingat hampir 90% madrasah di kabupaten Indragiri Hulu di kelola oleh masyarakat (swasta) dengan tingkat kualifikasi yang berbeda dalam berbagai segi. Dan mengingat persoalan madrasah selalu bersentuhan dengan keterlibatan masyarakat, maka posisi masyarakat baik sebagai pengelola, pengguna maupun pemerhati madrasah, perlu searah dan sejalan dengan pemerintah. Tepatnya, perlu ada konvergensi yang harmonis dan dinamis antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar proses peningkatan mutu dan kualitas pendidikan madrasah serta tujuan pendidikan nasional pada umumnya sebagaimana diamanatkan UU No. 20 tahun 2003 tercapai secara optimal.

⁵ Syaiful Sagala, *Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan*, Alfabeta Bandung, 2008, Hal 280.

⁶ Afril Guza, *PP Nomor 63 th 2008*, Asih Mandiri, Jakarta, Hal. 88.

Madrasah sebagai sub sistem pendidikan nasional, juga menghadapi tantangan yang sangat besar karena madrasah dituntut untuk melaksanakan PP No 19 tahun 2005 pasal 4 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengawasan pendidikan, dengan tujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat.⁷

Pengalaman selama ini memberikan pelajaran bahwa tidak seluruh kebijakan lahir dengan gampang. Ia harus memiliki kekuatan tawar-menawar kultural dan dalam hal tertentu bahkan bersifat politis. Sekurang-kurangnya, untuk melahirkan kebijakan madrasah perlu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat. Oleh karena itu perlu diadakan kajian madrasah itu sendiri dengan melakukan survai tentang respons masyarakat terhadap posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional saat ini khususnya di kabupaten Indragiri Hulu. Survai ini secara tidak langsung dapat menjembatani kepentingan masyarakat dalam menentukan dan melaksanakan pengelolaan madrasah dari, untuk dan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga peran yayasan sebagai payung hukum dari lembaga pendidikan akan jelas.

Menggagas soal pendidikan pada dasarnya adalah menggagas kebudayaan dan peradaban, sebab pendidikan dapat diartikan sebagai upaya merekonstruksi pengalaman-pengalaman peradaban umat manusia guna memenuhi tugas kehidupannya, generasi demi generasi. Madrasah meskipun bukan suatu yang *indigenous* dalam peta dunia pendidikan di Indonesia merupakan bagian pranata pendidikan yang memiliki ciri khas Islam dan berakar kuat pada sendi-sendi nilai dan

⁷ PP No 19 tahun 2005, *Standar Pendidikan nasional*. Bening, Jogjakarta, 2010 Hal. 104.

budaya yang dikembangkan masyarakat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa madrasah (khususnya swasta) telah menjadi salah satu wujud identitas budaya Indonesia dari, oleh dan untuk masyarakat.

Ali Imron dalam bukunya *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia* mengatakan “Partisipasi masyarakat adalah suatu *term* yang menunjuk kepada adanya keikutsertaan secara nyata dalam suatu kegiatan”. Partisipasi masyarakat dalam kebijaksanaan pendidikan adalah keikutsertaan masyarakat dalam memberikan gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan”.⁸

Di Kabupaten Indragiri Hulu perkembangan madrasah cukup pesat hal ini perlu menjadi kajian bagi kita untuk melihat sejauh mana eksistensinya dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu. Dari jumlah yang ada seharusnya madrasah mampu untuk menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu karena madrasah berada di bawah naungan yayasan dalam artian madrasah adalah milik, dari dan untuk masyarakat.

Otonomi pendidikan secara hakiki mengandung makna bahwa pelimpahan pendidikan lebih diarahkan kepada satuan pendidikan atau sekolah. Sekolah diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk membesarkan sekolah. Partisipasi masyarakat di dalam upaya menumbuh kembangkan sekolah dapat diukur seberapa sumbangan yang telah diberikan masyarakat terhadap beban biaya terhadap pembangunan sekolah, baik berupa materiil maupun moril.

⁸ Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, Hal. 80.

Perhatian masyarakat terhadap kualitas pendidikan merupakan salah satu ciri dari penerapan manajemen berbasis sekolah. Sistem pendidikan nasional perlu segera untuk dibenahi sejalan dengan tuntutan reformasi pendidikan sesegera mungkin dilakukan perubahan yang dilandasi oleh kesepakatan, komitmen, kesadaran dan dalam mewujudkan “masyarakat sekolah” yang memiliki loyalitas tujuan untuk meningkatkan mutu sekolah. Untuk mencapai terciptanya suatu masyarakat sekolah yang kompak dan sinergis, maka perlu pada setiap satuan pendidikan khususnya madrasah swasta dilindungi oleh “yayasan”. Untuk mewujudkan gagasan itu, maka di buat undang- undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Namun demikian, dari gejala-gejala yang kita lihat di lapangan secara umum menunjukkan bahwa masyarakat bersikap ganda terhadap madrasah yang seringkali menjadi hambatan bagi madrasah itu sendiri dalam mengemban tugas dan amanah undang-undang dan Peraturan Presiden tersebut. Hal ini terlihat dari beberapa gejala umum yang dapat penulis ungkapkan diantaranya :

1. Sebagian masyarakat menjawab tidak tahu menahu ketika ditanya tentang keberadaan Madrasah swasta.
2. Masih ada beberapa warga masyarakat yang tinggal di sekitar madrasah tetapi tidak memasukan anaknya ke Madrasah.
3. Ketika ditanyakan kepada beberapa calon siswa, madrasah tidak menjadi pilihan utama untuk melanjutkan pendidikan.

4. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa perbaikan kondisi madrasah merupakan urusan pemilik yayasan atau pengelola sehingga masih ada madrasah yang mempunyai sarana dan prasarana yang tidak layak pakai.
5. Masih ada anggota yayasan yang mengaku tidak efektif dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang berada dalam tanggung jawabnya
6. Masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa belajar di madrasah kurang bergengsi dibanding belajar di sekolah umum.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka masalahnya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Indragiri Hulu terhadap keberadaan madrasah yang ada disekitar mereka
2. Bagaimana pengelolaan madrasah oleh yayasan pendidikan Islam yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu
3. Bagaimana upaya masyarakat Indragiri Hulu dalam membantu dan membina madrasah yang ada di sekitar mereka
4. Apa saja yang dilakukan oleh pihak pemerintah (Kementrian Agama) dalam membina madrasah di Indragiri Hulu.
5. Apa sajakah upaya yang dilakukan oleh para pengelola yayasan pendidikan Islam dan Kementrian Agama dalam meningkatkan mutu madrasah sesuai

dengan amanat PP No 19 tahun 2005 pasal 4 tentang Standar Nasional Pendidikan?

6. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap madrasah yang bernaung di bawah yayasan pendidikan masyarakat?

C. Batasan Masalah

Mengingat terlalu luasnya permasalahan yang dapat ditimbulkan dalam penelitian ini penulis perlu membatasi permasalahan kajian tentang respon/pandangan masyarakat Indragiri Hulu terhadap keberadaan madrasah sesuai dengan UU No 20 tahun 2003 dan kaitannya dengan UU No 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penelitian ini berusaha untuk mengkaji masalah bagaimana pandangan masyarakat Indragiri Hulu terhadap keberadaan madrasah swasta sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2003.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan judul thesis ini, maka penulis perlu menjelaskan dan memberi batasan-batasan mengenai istilahistilah yang ada dalam judul thesis ini.

1. Pandangan

Pandangan atau penilaian dalam KBBI berarti proses, cara, pembuatan nilai, pemberian nilai (biji, kadar mutu, harga).⁹

2. Masyarakat

Sedangkan masyarakat dalam KBBI berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁰ Begitu juga Abdul Syani mengartikan masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama.¹¹

Dalam buku lain juga disebutkan masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.¹²

Masyarakat yang dimaksud dalam thesis ini adalah masyarakat yang merupakan orang tua wali murid dan masyarakat yang berada disekitar lokasi penelitian yang benar-benar mengetahui keberadaan Madrasah khususnya Madrasah Yayasan Pendidikan Agama Islam Rengat.

⁹ Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. III, hlm 783

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 721

¹¹ Abdul Syani, *Sosiologi : Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), hlm. 32

¹² Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 47

3. Keberadaan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata “keberadaan” diartikan sebagai hal berada atau kehadiran.¹³ Oleh karena itu yang dimaksud dengan keberadaan dalam penelitian ini adalah hal adanya atau kehadiran madrasah swasta di Kabupaten Indragiri Hulu.

4. Madrasah Swasta

Kata madrasah berasal dari bahasa arab yang artinya tempat belajar.¹⁴ Dalam *Shorter Encyclopedia of Islam*, madrasah diartikan : *The Name of an institution where the Islamic science are studied.*¹⁵

Dalam kamus al-Kautsar berarti sekolah.¹⁶ Lebih dikhususkan lagi sekolah-sekolah agama Islam. maksudnya di madrasah anak dapat mengikuti proses belajar yang terarah, dipimpin dan terkendali, yang mengajarkan gaya hidup religius.

Oleh karena itu yang dimaksud dengan madrasah swasta dalam thesis ini adalah madrasah yang dikelola oleh partikelir atau perorangan atau sekelompok orang yang biasanya tergabung dalam wadah yayasan.

13 Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. III, hlm.5

14 Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasit*, Juz I, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1972), hlm. 289

15 H.A.R Gibb and Jh Kramers, *Shorter Encyclopedia of Islam*, (Netherlands : Leiden, 1991), hlm. 300

16 Husin al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, (Bangil: Yayasan Pesantren

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka secara umum penelitian bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap posisi madrasah di Kabupaten Indragiri Hulu dan secara khusus ingin mengetahui pandangan masyarakat terhadap keberadaan madrasah di Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Madrasah di Kabupaten Indragiri Hulu penelitian ini bermanfaat dalam mengadopsi pemikiran-pemikiran masyarakat yang ada di sekitar mereka.
2. Bagi yayasan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk membenahi madrasah di Kabupaten Indragiri Hulu dan memberikan tanggung jawab kepada yayasan sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di madrasah tersebut.
3. Bagi para peneliti di bidang pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendorong dilakukannya penelitian yang lebih mendalam lagi dalam aspek yang lain sehingga dapat memperbanyak informasi mengenai madrasah swasta di Kabupaten Indragiri Hulu.

4. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Prodi Pendidikan Islam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Telaah atas Tulisan Sebelumnya yang Relevan

Sepengetahuan penulis, penelitian ini bukan yang pertama kalinya, namun ada beberapa penelitian yang meneliti tentang madrasah yang dikaitkan dengan respon masyarakat atau minat masyarakat. Data ini nantinya akan penulis gunakan sebagai sandaran teoritis dan sebagai komparasi dalam mengupas berbagai masalah dalam penelitian, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, skripsi Aska Fikriyah yang berjudul "Minat Masyarakat Muslim Pengrajin Ukir Untuk Menyekolahkan Anak Ke Madrasah (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)"¹ dalam skripsi ini disimpulkan bahwa minat masyarakat muslim pengrajin ukir di Desa Kecapi untuk menyekolahkan anak ke madrasah sangat kuat. Skripsi yang ditulis oleh Aska Fikriyah ini mempunyai perbedaan dengan thesis yang penulis susun, yaitu pada pembahasan antara minat masyarakat untuk menyekolahkan anak ke madrasah dan pandangan masyarakat terhadap madrasah swasta, selain itu obyek yang dikaji juga berbeda.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Aid Mustaqim yang berjudul "Respon Masyarakat Terhadap Beberapa Lembaga Pendidikan Islam di Kecamatan Kaliwiro

¹Aska Fikriyah, Minat Masyarakat Muslim Pengrajin Ukir Untuk Menyekolahkan Anak Ke Madrasah (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara), Skripsi IAIN Walisongo Semarang (Semarang: Perpustakaan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2002)

Kabupaten Wonosobo",² dalam tesis ini disimpulkan bahwa dengan kondisi masyarakat yang pragmatis dan hedonis dan dengan tidak terjaminnya lulusan dari LPI menjadi Ustad/ Kyai atau pada orientasi agar lulusan menjadi PNS, respon masyarakat berpendapat bahwa dengan adanya LPI tidak dapat/belum dapat memenuhi keinginan masyarakat. Tesis yang ditulis oleh Aid Mustaqim mempunyai perbedaan dengan tesis yang ditulis oleh penulis yaitu pada pembahasan antara respon masyarakat terhadap beberapa Lembaga Pendidikan Islam dan pandangan masyarakat terhadap madrasah swasta, begitu juga dengan obyek penelitian yang dikaji berbeda.

B. Konsep Madrasah

Menurut Azyumardi Azzra, dalam buku Tradisi dan Modernisasi Melenium Baru, harus dikatakan bahwa "sepanjang sejarah Islam, sejak zaman Nizham al-Mulk, keberadaan Madrasah memang didedikasikan terutama kepada *al'ulum al-diniyah* dengan penekanan khusus pada bidang Fiqh, Tafsir dan Hadis. Dengan demikian, ilmu-ilmu non agama sejak awal perkembangan madrasah memang sudah berada pada posisi yang marjinal.³

Pendidikan agama adalah Pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan

² Aid Mustaqim, *Respon Masyarakat Terhadap Beberapa Lembaga Pendidikan Islam di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo*, Tesis IAIN Walisongo Semarang (Semarang: Perpustakaan Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2004)

³ Azzumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Melinium Baru*, logos, Jakarta, 2008, hh vii

ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.⁴

Menurut Syekh Muhammad An-Naqib Al-Attas Pendidikan Islam ialah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan membimbing kearah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat didalam tatanan wujud dan keberadaan.⁵

Disamping itu Madrasah Menurut Departemen Agama mempunyai arti Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan Pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.⁶

Pengertian ini memperkuat posisi madrasah didalam mengembangkan diri di masyarakat karena posisi madrasah menurut Departemen Agama ini mempunyai dua makna yakni pendidikan umum yang berciri khas agama, sehingga kalaulah dikelola dengan baik maka madrasah mempunyai dua keunggulan.

Arah dan pengembangan pendidikan di madrasah bertujuan untuk dapat "Mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berkepribadian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara".⁷

⁴ Dep Agama, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan III Pendidikan disiplin Ilmu*, 2007, Hal. 2.

⁵ H.Djamiluddin dan Abdullah Aly, *Kepakta selekta Pendidikan Islam*, Pustaka Setia, 1999, Hal.10.

⁶ Dep.Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Mata Pelajaran umum dan Madrasah*, Dirjen kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2004 Hal. 2..

⁷ Dep.Agama. *Desain Pengembangan Madrasah*, Dirjen kelembagaan Agama Islam, Jakarta 2004, Hal,18.

Pengembangan madrasah ini seharusnya menjadi acuan untuk mengantarkan anak-anak didik menjadi manusia yang mempunyai dua kemampuan yakni kemampuan teknologi dan nilai keimanan untuk bekal kehidupan di masa depan.

Undang-undang No 16 tahun 2001 pasal 1 yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, Sedangkan pasal 7 dijelaskan yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.⁸

Disisi lain posisi madrasah adalah kedudukan madrasah dalam sistem pendidikan nasional saat ini. Dalam bahasa kebijakan, posisi atau kedudukan mengandung arti yang sangat politis, Menurut UU No.20 tahun 2003, jenis pendidikan umum jenjang pendidikan dasar adalah berbentuk SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat, serta SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat. sedangkan pendidikan menengah berbentuk SMA, MA dan SMK, atau bentuk lain yang sederajat.⁹

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 mengharuskan semua lembaga pendidikan di Indonesia memenuhi 8 standar nasional pendidikan yang terkait dengan isi, kompetensi lulusan, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelola pembiayaan, serta penilaian pendidikan.¹⁰

Departemen Agama dalam bukunya kendali Mutu Pendidikan Agama Islam Masyarakat di lingkungan sekolah sebagai lingkungan yang turut mewarnai karakteristik para peserta didik, baik kemungkinan bersifat positif maupun negatif,

⁸ Lihat Afnil Guza, *Op, cit*, Hal.56, 57.

⁹ UU No.20 tahun 2003, Bening, Jogjakarta, 2010. Hal. 17-18.

¹⁰ PP No. 19 Tahun 2005, *Standar Pendidikan Nasional*, Bening, Jogjakarta, 2010, Hal.103.

diharapkan mampu melakukan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dengan tugas-tugas :

- a. Turut melakukan pengawasan terhadap para peserta didik yang diindikasikan melakukan penyimpangan sikap dan perilaku melanggar hukum.
- b. Membantu menciptakan lingkungan yang aman, damai dan religius.
- c. Mendorong terciptanya kerja sama yang baik, khususnya dalam pembinaan kegiatan keagamaan.
- d. Memberikan masukan (saran) dan kritik terhadap pembinaan keagamaan di sekolah.¹¹

Untuk lebih mengarahkan tentang partisipasi masyarakat, Dr. Ravik Karsadi dalam bukunya Sosiologi pendidikan mengatkan kata “partisipasi“ dalam pembangunan menunjukkan pengertian pada keikutsertaan mereka dalam pemcaanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program pembangunan (United Nation, 1975). Dalam kebijakan nasional kenegaraan saat ini, melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembagunan adalah merupakan suatu konsekuensi logis dari implementasi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.¹²

Pendapat Ravik Karsadi ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk lebih berperan dalam pendidikan dalam mengimplentasikan UU Nomor 22 tahun 1999. Undang-undang ini juga diperkuat dengan UU Nomor 16 tahun 2006, yang

¹¹ Lihat Departemen Agama, *Op.cit.*Hal 10.

¹² Ravik Karsadi, *Sosiologi Pendidikan* ,UNS Press, Surakarta, 2008, Hal. 220.

mana masyarakat diperbolehkan dalam menjalankan pendidikan dalam bentuk yayasan.

Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu : (1) adanya kemauan, (2) adanya kemampuan, dan (3) adanya kesempatan untuk berpartisipasi.¹³

Disisi lain Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan muncul dari keaktifan dan inisiatif masyarakat terutama madrasah swasta yang keberadaanya lebih banyak di kabupaten Indragiri Hulu. Partisipasi masyarakat dalam hal ini menyangkut kemauan, kemampuan, dan kesempatan masyarakat untuk berbuat memperhatikan madrasah.

Bagi suatu masyarakat, hakikat pendidikan diharapkan mampu berfungsi menunjang bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya. Agar masyarakat itu dapat melanjutkan eksistensinya, maka diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan dan bentuk tata perilaku lainnya kepada generasi mudanya. Tiap masyarakat selalu berupaya meneruskan kebudayaanya dengan proses adaptasi tertentu sesuai corak masing-masing periode zamannya kepada generasi muda melalui pendidikan atau secara khusus melalui interaksi sosial sebagai proses sosialisasi.¹⁴

Masyarakat pada tatanan seperti ini memerlukan pendidikan untuk kelangsungan kehidupannya dan untuk memelihara eksistensinya, sehingga pendidikan menjadi alternatif utama dalam mencapai kesemuanya itu.

Menurut Isjoni, dalam bukunya Pokok-pokok Pemikiran Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu, tujuan di dibentuknya komite sekolah antara lain: “mewadahi dan meyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam

¹³ *Ibid* Hal. 221.

¹⁴ *Ibid* Hal. 223.

melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, kemudian meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.”¹⁵

Untuk menyalurkan keinginan masyarakat menurut Isjoni adalah dengan dibentuknya komite-komite sekolah yang di dalamnya terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap dunia pendidikan. Masyarakat tersebut mempunyai tanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan sehingga tujuan pendidikan sebagaimana yang di harapkan masyarakat itu sendiri dapat tercapai. Komite madrasah yang pada Prinsipnya mewakili masyarakat dalam bentuk kecil akan lebih mampu mengontrol dan membina madrasah.

Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.¹⁶ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 ini menegaskan tentang partisipasi masyarakat dalam mengembangkan dunia pendidikan, hal ini lebih menguatkan lagi peranan masyarakat di dalam hal pengembangan pendidikan di Indonesia Khususnya di kabupaten Indragiri Hulu.

¹⁵ Isjoni, *Pokok-pokok Pikiran Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu*, Unri Press, 2007, Hal 60.

¹⁶ UU No.20 tahun 2003, Op cit, Hal. 16

Peran serta Masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, Organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.¹⁷

Apabila partisipasi masyarakat di butuhkan dalam menentukan arah bersama mengenai penyelenggaraan program dan mutu pendidikan, maka hal yang pertama dilakukan adalah mengajak kerja sama dengan masyarakat lingkungan di mana pendidikan itu berada, itulah yang disebut dengan lingkungan strategis.¹⁸

Saiful Sagala, memberikan makna yang jelas tentang partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan hal yang dapat kita maknai adalah lingkungan masyarakat sangat strategis dalam menciptakan lingkungan pendidikan sehingga penataan lingkungan oleh masyarakat perlu diatur dalam peraturan yang baik pula.

Mutu dapat diartikan sebuah kualitas yang terdapat dalam sebuah sistem atau alat (*tools*) dan efektivitas sendiri merupakan hasil akhir dari penerapan sebuah sistem yang berkualitas. Oleh karena itu dalam pendidikan persoalan mutu dan efektifitas merupakan permasalahan yang kompleks.¹⁹ Mutu seringkali dikaitkan dengan lembaga pendidikan umum yang bonafit dan mahal. Madrasah merupakan lembaga pendidikan luar yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Pendidikan agama merupakan pendidikan yang unggul, keunggulannya terletak pada konsep-konsepnya yang universal, radikal, integral dan menyentuh semua aspek kehidupan dan kebutuhan manusia. Di samping itu, pendidikan agama berprinsip dasar pada aspek keseimbangan lahir-batin, jiwa raga, material-spiritual, dunia-akhirat dan

¹⁷ *Ibid*, Hal 51..

¹⁸ Lihat Syaiful Sagala, *Op.cit*, Hal. 281.

¹⁹ Ace Suryadi dan HAR Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 1993), hlm. 160

sebagainya.²⁰

Sebagai agama yang bersumber pada wahyu (al-Qur'an) dan al-Sunnah, Islam terbukti memiliki ajaran yang komprehensif, yaitu ajaran yang tidak hanya ditujukan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia ini, melainkan juga di akhirat. Di samping itu pendidikan Islam memiliki berbagai aspek yang tercakup di dalamnya, aspek tersebut dapat dilihat dari cakupan materi didikannya, filsafat, sejarah, kelembagaan, sistem dan segi kedudukannya sebagai ilmu.²¹ Dari segi aspek materi didikannya, pendidikan Islam sekurang-kurangnya mencakup pendidikan akhlak, fisik, akal, agama (akidah dan syariah), kejiwaan, rasa keindahan, ketrampilan dan sosial kemasyarakatan.²²

Hal ini didasarkan pada ajaran Islam yang mengajarkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat sebagaimana dideskripsikan dengan tepat dalam al- Qur'an:



“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi.....” (QS al-Qashas: 77).²³

Dari konsep al-Qur'an tersebut tergambar bahwa materi pendidikan Islam itu pada prinsipnya ada dua, yaitu materi pendidikan yang berkenaan dengan masalah dunia dan materi pendidikan yang berkaitan dengan masalah akhirat. Dengan demikian diketahui bahwa pendidikan agama bagi masyarakat merupakan satu aspek

²⁰ Darmu'in, *Prospek Pendidikan Islam di Indonesia: Suatu Telaah Terhadap Pesantren dan Madrasah dalam PBM–PAI di sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 75

²¹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 292-293

²² Muhammad 'Athiyah Abrasyi, *Tarbiyah Al-Islamiah*, (Kairo : Darul Hadits, t.t), hlm. 22-25

²³ Soenarjo, dkk., Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 623

yang tak terpisahkan dari aspek-aspek kehidupan lainnya. Sehingga baik secara historis maupun filosofis pendidikan agama telah mewarnai dan menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam proses pembentukan jati diri masyarakat.

Salah satu bukti otentiknya sebagaimana dinyatakan dalam tujuan pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²⁴ Untuk mencapai tujuan dan fungsi pendidikan tersebut dibutuhkan modal pendidikan agama yang sesuai dan cocok untuk kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, suatu lembaga pendidikan akan berhasil menyelenggarakan fungsinya jika dapat mengintegrasikan dirinya ke dalam kehidupan masyarakat, lebih dari itu suatu lembaga pendidikan akan diminati masyarakat jika ia mampu memenuhi kebutuhan mereka akan ilmu pengetahuan baik umum maupun agama sehingga mereka menjadi ilmuwan yang agamis yang bisa hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai manusia yang berbudi luhur dan terhormat.

Maka dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Islam yang diharapkan mampu memberikan nuansa baru bagi pengembangan sistem pendidikan Islam di Indonesia, dan sekaligus hendak memberikan kontribusi dalam menjabarkan makna pengembangan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 20, Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II, Pasal 3, hlm. 12.

Tuhan Yang Maha Esa, muncullah berbagai pemikiran dan kebijakan dalam rangka pembaharuan pendidikan Islam antara lain tentang pembinaan pendidikan agama Islam terpadu.²⁵ Oleh karena itu pendidikan harus dilaksanakan dengan terencana, teratur dan saling berkaitan secara komprehensif, sehingga kegiatan pendidikan dapat membuahkan hasil yang optimal.

Dengan kualitas lembaga pendidikan yang dapat dipertanggung jawabkan maka akhir dari persoalan mutu pendidikan akan berada pada kemampuan lembaga pendidikan (sekolah) dalam mendistribusikan, mengelola dan mendayagunakan sumber-sumber pendidikan secara optimal agar dapat meningkatkan kemampuan belajar lulusannya.²⁶

²⁵ Muhaimin, et.al, *Paradigma Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 35.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 163

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini berfokus pada fenomena-fenomena yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Dan setiap peneliti pada dasarnya memiliki teknik dalam suatu pendekatan suatu obyek penelitian yang akan diteliti, sehingga dapat mengungkap gejala atau fenomena-fenomena yang akan dilakukan oleh peneliti. Survei ini menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan untuk keperluan analisis data, didukung dengan data kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksploratif, dimana penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang keberadaan madrasah swasta, dalam hal ini khususnya Yayasan Pendidikan Agama Islam Rengat yang semakin tahun, semakin bertambah muridnya.

2. Subyek Data

Subyek data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Subyek penelitian merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi mengenai data penelitian. Karena penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, maka data yang dihimpun terutama diperoleh dari data-data lapangan yang

representatif. Guna mendapatkan data yang akurat, penulis mengambil sample¹ dari populasi²

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua anggota masyarakat di Kecamatan Rengat yang telah dewasa dari berbagai profesi yang ada. Dengan jumlah responden 5234 yang sedemikian banyaknya, maka tidaklah seluruh profesi tersebut akan dijadikan responden penelitian. Adapun responden ini akan dipilih berdasarkan *purposive sampling* yakni pemilihan responden berdasarkan tujuan tertentu,³ yakni untuk mengetahui sejauh mana masyarakat menilai tentang keberadaan Madrasah swasta yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

Penggunaan tehnik ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sample yang dipilih benar- benar mengetahui keberadaan Madrasah swasta dan perkembangannya yang ada di sekitar mereka. Sampel yang diambil dalam penelitian adalah 7 dari 43 madrasah swasta dengan jumlah responden sebesar 107 yang diambil dari ; 1) orang tua siswa dari 7 madrasah terpilih, 2) Penduduk setempat yang tinggal tidak jauh dari madrasah terpilih tersebut. Yang keseluruhannya diambil secara *purposive*.

¹ Sampel adalah kelompok kecil individu yang dilibatkan langsung dalam penelitian, *Lihat Ibnu Hadjar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 133

² Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kelompok yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. *Ibid.*

³ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 165

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian mengenai "Pandangan Masyarakat Inderagiri Hulu Terhadap Madrasah Swasta" ini adalah penelitian survey. Alasan memilih menggunakan pendekatan ini karena pendekatan ini sangat efektif digunakan dalam penelitian sosial. Pendekatan ini dapat memberikan informasi yang detail dan akurat mengenai populasi yang heterogen. Dengan menggunakan pendekatan penelitian survey ini hasil yang diharapkan adalah akan didapatkannya informasi yang detail mengenai penilaian masyarakat terhadap madrasah swasta yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian.⁴ Dalam suatu penelitian, diperlukan data yang mempunyai validitas tinggi. Untuk memperoleh data tersebut, penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya :

a. Metode Angket

Kuisisioner/ angket/ merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁵ Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui atau mendapatkan informasi tentang pandangan masyarakat terhadap madrasah swasta yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 121

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2006), hlm.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek yang menggunakan seluruh alat indera.⁶ Metode ini digunakan untuk menggali data tentang keadaan umum madrasah swasta yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

c. Metode Wawancara/ Interview

Interview juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara⁷. Pedoman wawancara yang peneliti gunakan adalah bentuk "*semi structured*" dalam penelitian ini, mula-mula interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut.⁸ Dengan demikian interviewer akan mendapatkan keterangan yang lengkap dan mendalam.

Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan madrasah seperti sejarah berdirinya madrasah, keadaan guru dan siswa, sarana prasarana madrasah dan informasi yang bersumber dari masyarakat tentang pandangan mereka terhadap keberadaan madrasah swasta yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2002), cet XII, hlm. 204

⁷ *Ibid.*, hlm. 201-202

⁸ *Ibid.*, hlm. 201-202

B. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.⁹

Setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut. Dalam memberikan interpretasi data yang diperoleh, menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.¹⁰

Penulis juga menggunakan teknik deskriptif-analisis-kritis, dengan menggunakan pola berfikir induktif,¹¹ dimana data-data yang hendak dikemukakan berpangkal dari fenomena riil di masyarakat untuk diterjemahkan dan dicari kesimpulannya. Kegunaan dari metode deskriptif sendiri adalah untuk menjelaskan bahwa suatu fakta (pemikiran) itu benar atau salah.¹²

Sedang yang dimaksud analisis-kritis merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian. Metode ini digunakan untuk mengembangkan analisis dengan melihat sisi kekurangan dan kelebihan dari madrasah diniyah itu sendiri. Metode-metode diatas diaplikasikan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan observasi terhadap obyek penelitian sehingga data yang ada akan diamati secara langsung dan akan dideskripsikan secara jelas, untuk diketahui sisi kelebihan dan kekurangannya tersebut.

⁹ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), cet. 7, hlm. 104

¹⁰ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung : Sinar Baru, 2001), hlm. 64

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 47

¹² 39 Jujun S. Susiasumantri, *Ilmu dalam Perspektif*, (Jakarta: Gramedia. 1999), hlm. 77

BAB IV

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MADRASAH

A. Perkembangan Madrasah

Pada tanggal 18 April 1972 Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tentang "Tanggungjawab Fungsional Pendidikan dan Latihan" isi keputusan ini pada intinya menyangkut tiga hal :

- a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan;
- b. Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggungjawab atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja dan bukan pegawai negeri;
- c. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggungjawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.¹

Dua tahun berikutnya, Keputusan Presiden ini dipertegas dengan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 yang mengatur realisasinya.

Bagi Departemen Agama yang mengelola pendidikan Islam, termasuk madrasah, Keputusan ini menimbulkan masalah. Dalam Tap MPRS No. 27 Tahun 1966 dinyatakan bahwa agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pencapaian tujuan Nasional. Selain itu, dalam Tap MPRS No. 2 Tahun 1960 ditegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Berdasarkan ketentuan ini, maka Departemen Agama menyelenggarakan pendidikan madrasah tidak saja bersifat keagamaan dan umum, tetapi juga yang bersifat kejuruan. Dengan Keppres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974 itu, penyelenggaraan pendidikan umum dan kejuruan menjadi sepenuhnya berada

¹ Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, logos, Ciputat, 1999, Hal. 146.

di bawah tanggungjawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Secara implisit ketentuan ini mengharuskan diserahkan penyelenggaraan pendidikan madrasah yang sudah menggunakan kurikulum nasional kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.²

Sampai disini masih terlihat secara jelas bahwa madrasah belum dianggap masuk ke dalam sistem pendidikan nasional. Penyerahan pengelolaannya di bawah departemen Agama agaknya semata-mata atas pertimbangan ini. Usaha-usaha penegerian dan penyusunan kurikulum 1973 sejauh ini tampaknya belum dapat dijadikan alasan untuk mengakui lembaga ini sebagai bagian penting dari Sistem Pendidikan Nasional.

Namun demikian, jika berpegang kepada undang-undang dan ketentuan yang ada, memasukkan madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional juga tidak sepenuhnya menguntungkan umat Islam. Dengan menjadi bagian dari Sistem Pendidikan Nasional madrasah memang akan mendapat status yang sama dengan sekolah, tetapi, dengan status ini terdapat konsekuensi bahwa madrasah itu harus dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan umum dan kejuruan. Hal yang terakhir ini tidak disetujui oleh umat Islam yang lebih menghendaki pengelolaan madrasah itu di bawah Departemen Agama sebagaimana berlangsung sampai sekarang.

Menarik untuk dicatat bahwa kebijakan disekitar Keputusan Presiden 34/1972 yang kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden 15/1974 menggambarkan ketegangan yang cukup keras dalam hubungan madrasah dengan pendidikan

² *Ibid*, Maksum, *Madrasah* Hal. 147.

nasional. Dalam konteks ini madrasah tidak saja diasingkan dari sistem pendidikan nasional, tetapi juga terdapat indikasi kuat akan dihapuskan.

Pemberitaan dan laporan mass media tentang kondisi madrasah yang sangat buruk pada saat itu, agaknya mempunyai maksud untuk membentuk citra negatif madrasah. Dengan kata lain, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di atas dipandang oleh sebagian umat Islam sebagai suatu manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah, padahal madrasah merupakan wadah utama pendidikan dan pembinaan umat Islam, sekaligus sebagai lembaga formal bagi umat Islam yang lebih diperhatikan pemerintah terutama bagi masyarakat pedesaan yang jauh dari pusat pemerintahan, yang sejak zaman penjajahan diselenggarakan oleh umat Islam.

Reaksi umat Islam terhadap kebijakan yang tidak menguntungkan itu diperlihatkan antara lain oleh Musyawarah Kerja majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A). Lembaga ini meyakinkan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam proses pembangunan. Menyinggung tentang pengelolaan madrasah itu, MP3A menegaskan bahwa "yang paling tepat diserahi tanggungjawab itu ialah Departemen Agama, sebab Menteri Agama lah yang lebih tahu tentang seluk beluk pendidikan agama, bukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri-menteri lain".³

Pemerintah Orde Baru menyadari bahwa umat Islam berkeberatan jika pengelolaan pendidikan madrasah berada sepenuhnya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagi umat Islam, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang berakar dari tradisi Islam sendiri sehingga tidak mungkin ditangani secara sekuler. Tetapi, pemerintah juga memahami bahwa umat Islam menuntut hak dan status yang lebih baik bagi madrasah sebagai bagian dari Sistem Pendidikan

³ *Ibid*, Hal. 148.

Nasional sehingga kedudukan dan orientasinya sama dengan sekolah. Terlebih-lebih dalam kenyataannya madrasah sudah melakukan modifikasi baik dalam kelembagaan maupun kurikulumnya sesuai dengan tuntutan dan tantangan pembangunan nasional.

Memperhatikan aspirasi umat Islam di atas, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru adalah melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah secara terus menerus. Karena itu, berkaitan dengan Keppres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974, pemerintah mengambil kebijakan yang lebih operasional dalam kaitannya dengan madrasah.

Pada tahun 1975 dikeluarkan Surat Keputusan bersama Tiga Menteri mengenai "Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah". Dalam Surat Keputusan Bersama itu, masing-masing Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian dalam Negeri memikul tanggungjawab dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan madrasah.

Kelahiran Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri memang antara lain untuk mengatasi kekhawatiran umat Islam akan dihapuskannya sistem pendidikan madrasah sebagai konsekuensi dari Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974. Menarik untuk dicatat bahwa keluarnya SKB itu didasarkan pada hasil Sidang Kabinet Terbatas pada tanggal 26 Nopember 1974. Pada Sidang kabinet itu, Menteri Agama Republik Indonesia Mukti Ali menyampaikan kecemasan umat Islam berkaitan dengan isi dan implikasi lebih jauh dari Keppres dan Inpres di atas. Pemerintah ternyata memberi perhatian terhadap masalah tersebut, , Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974, yang isinya :

1. Pembinaan pendidikan umum adalah tanggungjawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan tanggungjawab Pendidikan Agama menjadi tanggungjawab Menteri Agama.
2. Untuk pelaksanaan Keppres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974 dengan sebaik-baiknya perlu ada kerja sama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama.⁴

Dengan petunjuk pelaksanaan tersebut, ketegangan antara pendidikan agama dan pendidikan nasional memang dapat diatasi. Petunjuk pelaksanaan itu mengandung perbedaan yang cukup mendasar dengan keppres dan Inpres, dimana disitu dengan tegas dinyatakan bahwa hak dan tanggungjawab pengelolaan pendidikan agama tetap berada pada Departemen Agama.

Dengan demikian, petunjuk teknis telah memberikan sebuah model solusi yang disatu sisi memberikan pengakuan eksistensi pendidikan Islam termasuk madrasah dan IAIN dan penegasan bahwa pengelolaannya tetap di tangan Departemen Agama, namun disisi lain tetap memberikan kepastian akan berlanjutnya usaha yang mengarah pada pembentukan Sistem Pendidikan nasional yang integratif.

Sebagai tindaklanjut, juknis ini segera diikuti dengan penyusunan SKB Tiga Menteri. Bagi kalangan yang mempertahankan eksistensi madrasah, baik dari lingkungan Departemen Agama sendiri maupun dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, penyusunan SKB Tiga Menteri itu merupakan langkah strategis.

⁴ *Ibid*, Hal. 149

Dalam konteks di atas, sejumlah diktum yang memperkuat posisi madrasah lebih ditegaskan lagi dengan merincikan bagian-bagian yang menunjukkan kesetaraan madrasah dengan sekolah, misalnya dinyatakan :

- a. Madrasah Ibtidaiyah, setingkat dengan Sekolah Dasar.
- b. Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama.
- c. Madrasah Aliyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.

Selanjutnya disebutkan bahwa :

- a) Ijazah Madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan Ijazah Sekolah Umum yang setingkat.
- b) Lulusan Madrasah dapat melanjutkan ke Sekolah Umum setingkat lebih atas.
- c) Siswa Madrasah dapat berpindah ke Sekolah Umum yang setingkat.

Mengenai pengelolaan serta pembinaan dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Pengelolaan Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama;
- (2) Pembinaan mata pelajaran Agama pada Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama;
- (3) Pembinaan dan pengawasan mutu mata pelajaran umum pada Madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.⁵

Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri ini dapat dipandang sebagai pengakuan yang lebih nyata terhadap eksistensi madrasah dan sekaligus merupakan langkah strategis menuju tahapan integrasi madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional yang tuntas.

⁵ *Ibid* Hal. 151.

Dengan SKB tersebut, madrasah memperoleh definisinya yang semakin jelas sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah sekalipun pengelolaannya tetap berada pada Departemen Agama. Dalam hal ini, madrasah tidak lagi hanya dipandang sebagai lembaga pendidikan keagamaan atau lembaga penyelenggaraan kewajiban belajar, tetapi sudah merupakan "lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30 %, di samping mata pelajaran umum".

Sekalipun prosentase mata pelajaran agama Islam sesuai SKB adalah sekurang-kurangnya 30 %, namun semangatnya tetap 100 % di berikan di madrasah Aliyah sebagaimana yang sudah biasa dilaksanakan selama ini, hanya waktu yang disediakan untuk menyajikan mata pelajaran aga tersebut 30 % dari keseluruhan waktu/jam pelajaran yang ada di Madrasah Aliyah.

Dengan SKB Tiga Menteri, Departemen Agama melakukan usaha pemantapan struktur madrasah secara lebih menyeluruh. Sejumlah Keputusan dikeluarkan untuk mengatur organisasi dan tata kerja madrasah pada semua tingkatan. Departemen Agama juga mengeluarkan peraturan tentang persamaan ijazah madrasah swasta dengan madrasah negeri.

Dalam hal kurikulum dilakukan penyusunan ulang dengan menyempurnakan komposisi mata-mata pelajaran umum. Sejalan dengan SKB Tiga Menteri itu, kurikulum madrasah memuat mata-mata pelajaran umum dalam jumlah yang sama dengan kurikulum sekolah pada tiap-tiap jenjangnya. Madrasah dengan demikian dapat dikatakan sebagai sekolah plus pendidikan agama.

Penyempurnaan kurikulum madrasah merupakan langkah yang dianggap paling essential dalam merealisasikan SKB Tiga Menteri. Persamaan status madrasah dengan sekolah tidak hanya tampak dalam struktur kelembagaan, tetapi juga dalam struktur mata pelajaran yang mengakomodasikan secara penuh kurikulum sekolah.

Pada tahap awal setelah SKB, Departemen Agama menyusun kurikulum 1976 yang diberlakukan secara intensif mulai tahun 1978. Kemudian kurikulum 1976 ini disempurnakan lagi melalui kurikulum 1984 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Agama No. 45 Tahun 1987. Penyempurnaan ini sejalan dengan perubahan kurikulum sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada tingkat Ibtidaiyah, komposisi kurikulum 1984 terdiri dari 15 mata pelajaran. Bidang studi agama hanya mencakup sekitar 30 % dengan lima mata pelajaran. Dua diantaranya baru diberikan mulai kelas tiga, yakni Sejarah Islam dan Bahasa Arab. Selebihnya, sekitar 70 % dengan 10 bidang studi, merupakan mata-mata pelajaran umum yang diberikan sejak kelas satu hingga kelas enam.

B. Perkembangan Madrasah di Kabupaten Indragiri Hulu

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 25 Tahun 1999 sebagai titik tolak dari mulai diberlakukannya Otonomi Daerah. Hal ini membawa dampak terhadap implikasi pendidikan. Salah satu implikasi dari otonomi daerah adalah perubahan struktur organisasi dan manajemen pendidikan sejak dari pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Tidak mungkin kita pungkiri bahwa selama ini penyelenggaraan

pendidikan dikendalikan secara terpusat (sentralisasi) oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Semua kebijakan melalui instruksi dan mekanisme dari pusat, dan daerah tinggal menjalankan dan menyelenggarakan instruksi yang sudah dibuat dari pusat. Departemen Pendidikan Nasional membentuk Kantor Perwakilan di Provinsi, Kabupaten bahkan hingga ke tingkat Kecamatan sebagai unit pelaksanaan administrasi dan birokrasi perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Di Kabupaten Indragiri Hulu kebijakan tersebut memberikan perhatian tersendiri oleh masyarakat untuk lebih mengembangkan lembaga pendidikan swasta diantaranya adalah Madrasah yang pada saat ini tumbuh dan berkembang di tengah tengah masyarakat di bawah tanggung jawab Yayasan yang mendirikaninya.

Perjalanan sejarah yang cukup panjang di mana Pemerintah Pusat menjadi penentu dan pembuat kebijakan pendidikan akhirnya terpaksa harus legowo dan secara ikhlas memberikan wewenangnya kepada daerah sebagai suatu sebab dan akibat dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 25 Tahun 1999. Dengan demikian menunjukkan kepada kita bahwa pupus sudah hak dan wewenang pemerintah pusat yang selama ini terlalu banyak mengatur dan ikut campur dengan permasalahan pendidikan.

Sejarah membuktikan bahwa selama ini permasalahan pendidikan tidak pernah tuntas terselesaikan oleh pusat, selanjutnya terlihat jelas kebijakan yang dibuat sangat-sangat diskriminatif yang sering menimbulkan *dikotomi* yang sangat dalam didalam penyelenggaraan pendidikan. Jurang pemisah antara propinsi atau kabupaten/kota yang terdekat dengan pemerintah pusat dengan propinsi atau

kabupaten/kota yang jauh dengan pemerintah pusat cukup dalam, sehingga kebijakan berupa bantuan baik fisik maupun non fisik sangat berbeda.

Kualitas pendidikan sangat jauh tertinggal daerah yang lokasinya jauh dari pemerintah pusat. Undang-undang seperti disebutkan diatas secara hakiki suatu keberuntungan bagi daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan kebijakan di sektor pendidikan, dengan demikian maka pengelolaan dan pelayanan pendidikan didesentralisasikan kepada kabupaten/kota di seluruh tanah air Indonesia tercinta.

Bahkan dengan semangat otonomi, pada akhirnya penyelenggaraan pendidikan itu sendiri harus menjadi tanggungjawab masyarakat setempat, yaitu Yayasan, termasuk di dalamnya orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan bekerjasama dengan pemerintah. Pemerintah bertanggungjawab untuk membantu dan memberdayakan masyarakat agar mampu menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan nilai sosial budaya, potensi ekonomi, sumber daya yang ada serta SDM masyarakat setempat, hal ini disebut dengan Pendidikan Berbasiskan Masyarakat (*Community Based Education*).

Di dalam implementasinya, bahwa Pendidikan Berbasiskan Masyarakat yang merupakan salah satu otonomi pendidikan (*autonomy education*) bahwa visi dan misi utama adalah pemberdayaan masyarakat dalam mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di sekolah masing-masing. Ada 3 (tiga) komponen “pemilik” yang saling berkepentingan dalam sektor pendidikan apa yang disebut dengan *stakeholder* terhadap pelayanan pendidikan yaitu : keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Masing-masing pihak memiliki tingkat kepentingan yang sama. Misalnya kepentingan keluarga, bahwa harapan anak-anaknya agar dapat diterima di sekolah yang bersangkutan, diharapkan agar putra-putrinya beriman dan bertaqwa, berilmu pengetahuan, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, memiliki wawasan kecendekiawanan dan berintelektual sehingga mampu menjawab tantangan jaman yang serba tidak menentu, hal ini diwakili oleh Yayasan. Kepentingan masyarakat melalui lembaga pendidikan yang ada (sekolah) tercermin akan suatu harapan agar lingkungan mereka terbentuknya manusia-manusia pembangunan, visi dan misi sekolah adalah membangun masyarakat madani, sesuai dengan nilai budaya, potensi ekonomi dan SDM yang berkualitas, masyarakat mengharapkan agar institusi pendidikan setempat mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat, sehingga terciptanya terciptanya masyarakat yang memiliki kepekaan untuk maju dan berkembang.

Sedangkan kepentingan pemerintah dalam sektor pendidikan menjalankan amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yakni ikut bertanggungjawab mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diterjemahkan ke dalam setiap kebijakan pendidikan secara nasional yang menjadi visi dan misi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diserahkan wewenangnya kepada Kabupaten Indragiri Hulu.

Secara implisit maupun eksplisit peran Madrasah adalah pengembangan misi dari ketiga stakeholder tersebut di atas ditingkat sekolah. Mereka-mereka inilah yang diberikan kebijakan untuk mengatur rumah tangga madrasah kesepakatan bersama Yayasan Sekolah termasuk diantaranya orang tua, masyarakat, dan pihak sekolah

sebagai pengemban misi kesepakatan bersama, sehingga apapun putusan dan kebijakan tidak secara sendiri-sendiri, sekali-kali lepas iri akan tetapi merupakan putusan dan kebijakan bersama, dan harus dilaksanakan dan tentunya peran pemerintah melalui Kementerian Agama kabupaten Indragiri Hulu dan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu sangat besar didalam melalui proses pemantauan terhadap keputusan yang sudah diambil oleh pihak-pihak seperti disebutkan diatas. Masing-masing pihak memiliki hak untuk mempertanggungjawabkan suatu keputusan yang sudah disepakati bersama, dan jangan seolah-olah tidak tahu, dan kebijakan yang sudah disepakati bersama.

Apapun polisi madrasah ketiga komponen tersebut tidak boleh ditinggalkan, masing-masing pihak merupakan penanggungjawab terhadap sektor pendidikan, tanpa peran serta dan kontribusi positif dari komponen tersebut, maka pendidikan berbasis masyarakat tidak akan tercapai, secara langsung manajemen berbasis madrasah jauh tidak akan terwujud sesuai dengan harapan kita bersama.

Kesepakatan dan kebijakan yang diambil secara bersama dan bukan suatu keterpaksaan akan memiliki konsekuensi logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, dan masing-masing pihak akan mempertanggungjawabkan semua kesepakatan, dan orang lain tidak perlu ikut campur sehingga selalu membuat suasana menjadi keruh, dan sangat mungkin *memancing di air keruh*, dan membuat suasana menjadi objek permasalahan, dan untuk diingat ini persoalan rumah tangga tentulah diselesaikan secara kekeluargaan dan tentunya menjadi tanggungjawab stakeholder yang bersangkutan.

Jika kita cermati dengan maksud untuk memahami secara hakiki apa sebenarnya pendidikan berbasiskan masyarakat, sehingga jangan sampai salah kaprah kita untuk mengartikan secara hakiki maknanya. Ini membuktikan bahwa masalah pendidikan sudah menjadi tanggungjawab masyarakat termasuk orang tua di dalamnya.

Tanpa peran serta dan kontribusi mereka-mereka ini tentulah pendidikan untuk membentuk manusia dewasa tidak akan terwujud, harapannya untuk menjadikan putra-putrinya untuk menjadi manusia berguna tidak akan tercapai.

Apabila suatu keputusan dan kebijakan diambil secara bersama tanpa pemaksaan selanjutnya melalui musyawarah bersama, dialog dari hati ke hati dengan semangat kebersamaan, yang memiliki ekonomi menengah ke atas tentu tidak akan sama dengan ekonomi menengah jika persoalan untuk membangun sarana dan prasarana yang jelas mendukung pendidikan.

C. Peran Yayasan sebagai Pelindung Madrasah Swasta di Indragiri Hulu

Suatu keharusan pemerintah melalui Kementrian Agama dan Departemen Pendidikan Nasional melakukan berbagai terobosan untuk mencari paradigma baru dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan.

Hal ini sejalan dengan semangat otonomi pendidikan, sebagai dampak dari perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan peran serta dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap kebijakan pendidikan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengaktifkan dan memberikan dorongan kepada Yayasan. Yayasan merupakan amanah rakyat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.

Disamping itu Yang tidak kalah pentingnya peran masyarakat adalah dengan Pembentukan Dewan Pendidikan untuk Kabupaten dan Kota bukanlah mengada-ada, akan tetapi memiliki dasar hukum yang jelas, setidaknya 7 (tujuh) point, salah satunya adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Jika dipahami secara benar Yayasan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan kabupaten/kota.

Dewan ini bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun lembaga pemerintah lainnya. Yayasan merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang memiliki komitmen dan loyalitas serta memiliki kepedulian terhadap kualitas pendidikan di daerah.

Keberadaan Yayasan sebagai mitra (partnership) baik bagi pihak eksekutif, legislatif maupun Dinas Pendidikan. Jangan sampai timbul praduga yang bukan-bukan terhadap keberadaan Yayasan tersebut, dan Yayasan ini berperan seperti tercantum melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.

Keberadaan Yayasan secara hakiki adalah sebagai mitra bukan sebagai saingan, atau akan mencari kesalahan Dinas Pendidikan atau Pemerintah Daerah, atau pengurus nantinya apabila terbentuk ujung-ujungnya minta honor banyak. Hendaknya prasangka tersebut dibuang jauh.

Jadi, tidak ada satupun undang-undang atau peraturan yang melarang terbentuknya sebuah Yayasan ini, karena Yayasan ini merupakan organisasi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan pendidikan, janganlah sampai berpikir terlalu jauh.

Bila dihayati dan direnungkan Yayasan itu bersifat mandiri dan independen. Anggota dan pengurus terdiri dari tokoh-tokoh pendidikan, praktisi pendidikan, LSM, tokoh masyarakat, yayasan penyelenggara pendidikan, dunia usaha/industri, PGRI, dan perwakilan komite sekolah.

Pada umumnya mereka adalah pekerja sosial, dan honor bukan menjadi prioritas bagi mereka, akan tetapi yang sangat-sangat terpenting adalah bagaimana mutu pendidikan dapat meningkat, dan keluaran SDM berkualitas.

Jika dibaca Undang Undang tentang Yayasan ini tentang panduan umum pengelolaan Yayasan terlihat banyak tugas dan peran serta fungsi Yayasan. Diantaranya : Mendorong komitmen masyarakat pendidikan bermutu, melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah dan DPRD, menampung dan menganalisa aspirasi, ide, dan tuntutan diajukan masyarakat, memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah, DPRD, mendorong orang tua berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan dan sebagainya.

Yayasan adalah suatu organisasi masyarakat yang peduli pendidikan, yang memiliki tujuan untuk : mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan pendidikan, meningkatkan tanggungjawab dan peran

aktif seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Dari point-point diatas, benar adanya tugas Yayasan sangat berat, akan tetapi menyadari tentunya tugas yang dibebankan tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari eksekutif maupun legislatif, manalah mungkin Yayasan bekerja maksimal.

Terbentuknya Beberapa Yayasan di Kabupaten Indragiri Hulu yang menaungi madrasah merupakan satu terobosan dan kiranya Yayasan di Kabupaten Indragiri Hulu dapat memberikan masukan dan gagasan briliyan kepada Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten bahkan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam kerangka peningkatan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu ke depan.

**REKAPITULASI DATA SISWA MADRASAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2009-2010.**

No	Kecamatan	RA			MI			MTs			MA		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Pasir Penyau	130	101	231	0	0	0	236	286	522	99	238	337
2	Seberida	144	149	293	159	172	331	217	194	411	118	205	323
3	Rengat Barat	0	0	0	57	60	117	203	213	416	94	225	319
4	Rengat	14	11	25	101	91	192	200	223	423	139	178	317
5	Peranap	0	0	0	0	0	0	164	144	308	134	123	257
6	Kelayang	0	0	0	0	0	0	49	42	91	39	29	68
7	Sei Lala	0	0	0	0	0	0	57	55	112	30	23	53
8	Kuala Cenaku	0	0	0	122	104	226	54	48	102	20	22	42
9	Batang Cenaku	0	0	0	59	66	125	8	19	27	19	20	39
10	Batang Gansal	0	0	0	165	154	319	0	0	0	0	0	0
11	Lirik	0	0	0	23	25	48	45	55	100	0	0	0
12	Lubuk Batu Jaya	27	27	54	0	0	0	53	60	113	0	0	0
13	Rakit Kulim	0	0	0	47	48	95	30	20	50	0	0	0
14	Batang Peranap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	41	38	79	517	488	1005	660	666	1326	381	395	776

**DATA JUMLAH MADRASAH (RA, MI, MTs DAN MA) NEGERI DAN SWASTA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2009**

No	No Urut	Nama Madrasah	Alamat	Nama Kepala Sekolah	No HP
1	1	RA Al Ikhsan	Jl. Ahmad Yani-Buluh Rampai Kec. Siberida	Sulistiayani	0813 71790008.
	2	RA Mamba'ul Huda	Jl. Prop Jaya-Buluh Rampai Kec. Siberida	Siti Mubaiyyanah	0813 65445065
	3	RA Nurul Islam	Jl. Tawes RT 08 RK 03 Seresam Kec.Siberida	Badriyah	0812 6849672
	4	RA Al Islam	Jl. Letjend S.Parman No.4 Petalabumi Kec.Siberida	Kartika Nurwita K.	0852 78558950
	5	Ra Risalatul Mustaqim	Sei Arang-Pangkalan Kasai Kec. Siberida	Sugianto	0812 75486253
	6	RA An Nisa'	Jl. Banteng Kampung Besar Seberang Rengat	Hj. Murni,A.Ma	0812 7581462
	7	RA Tunas Harapan(Yastri)	Jl. Sudirman Gg Purnama Wonorejo-Air molek	Nur Baiti	0813 71115855
	8	RA Raudhatul Ulum(Yaspir)	Jl. Nusa Indah Cav.Candi rejo -P. Penyu	Herni, A.Ma	0813 65042652
	9	BA 'Aisyiyah	Komp. Masjid Taqa S.Beras-beras SP. II L. Jaya	Hasmiwita	0852 71704648
	10	RA Al Kautsar	Jl. Flamboyan SP.Iv Desa Air Putih Kec. Lb.Jaya	Nuraini	0812 765423
2	1	MIN Sungai Beringin	Jl. Rakimun No. 41 Sei Beringin – Rengat	R. Yurdaningsih, S.Pd. I	0819 33677045

	2	MIS Nurul Jum'ah	Jl. Ismail Kec. Kuala Cenaku	Kaharuddin, S.Ag	0813 65237581
	3	MIS Al Ikhlas	Tanjungsari Kec. Kuala Cenaku	Endang Satriana, A.Ma	0813 65527246
	4	MIN Buluh Rampai	Jl. Ahmad Yani Kec. Seberida	Umi Sarah, S.Ag	0812 7581462
	5	MIS Nurul Islam	Jl. Tawes Seresam Kec. Seberida	Wiyati	0813 71286570
	6	MIS Luhur Islam	Jl. Poros II Tanah Datar Kec. Rengat Barat	Mujerimun	0813 71524353
	7	MIS Al Fattah	Talang Bersemi Kec. Batang Cenaku	Hamim Thohari	0828 6481636
	8	MIS Miftahul Huda	Sukamaju II Kec. Rakit kulim	Irwansyah, S. Pd.I	0813 75908276
	9	MIS Nurul Hidayah	Km. 23 Kayu Kawan Kec. Batang Gansal	M Syamsuddin, A. Ma	0852 78870452
	10	MIS Darul 'Ulum	Balam Jaya-Sei Akar Kec. Batang Gansal	Irman Susanto, A. Ma	0812 76529255
	11	MIS Nurul ' Ulum	Talang Mulia Kec. Batang Cenaku	Refmi Eriza, A.Ma	0852 65759494
	12	MIS Darul 'Ulum	Danau Baru- Rengat Barat	Isroi, S.Ag	0812 76848834
	13	MIS Raudhatul Ulum	Jl Talau Redang Seko kec. Lirik	BARDAN	
3	1	MTs N Pekan Heran	Jl. Raya Km.II Pematang Reba- Rengat Barat	Maryati, S.Pd. I	0852 65506889
	2	MTs S YMI Riau	Jl. Sei Baung Bukit Petaling Kec.	Suhaimi, Drs	0819

			Rengat Barat		77622226
3	MTs S Thariqul Hidayah	Jl.Raya Lama Km. 30 Danau Baru- Kec.Rengat Barat	Ali Akbar Johan	0813 65225203	
4	MTs S Madinatun Najah	Jl. Narasinga No. 72 Kec. Rengat	A. Arif Ramli, Drs	0813 71057512	
5	MTs S Nurul Iman	Sei Beringin - Kec. Rengat	Dewi Nova Maryati,SP	0813 65378873	
6	MTs S Al Fadhl	Jl. Sri Paduka 12 Kp. Besar Seberang Rengat	Said Abdul Aziz, SE	0813 78387533	
7	MTs S Nurul Jum'ah	Jl. Ismail Kec. Kuala cenaku	Syamsuar,S. Ag	0852 63250002	
8	MTs S Hidayatullah	Jl. Hangtuh Km.22 Kec. Kuala Cenaku	Darmawi,Drs	0813 71654099	
9	MTs S Al Ikhsan	Jl. Manggis Buluh Rampai- Kec Seberida	Syamsuddin, S.Ag	0813 71317301	
10	MTs S Al Islam	Jl. Letjen S. Parman Petala Bumi- Kec. Seberida	Imam Sobaruddin,S .Pd.I	0813 71415577	
11	MTs S Darul Huda	Jl. Pesantren-Sei Sagu Kec. Lirik	H. Ustman,S.Pd. I	0812 75597174	
12	MTs S Nurul Falah	Jl. Jend Sudirman Air Molek- Pasir Penyu	Sayuti Kamal	0852 71460700	
13	MTs Khairul Ummah	Jl. Jend Sudirman Batu Gajah- Pasir Penyu	Asnawi, Drs	0813 65436731	
14	MTs S Darussalam	Pasir Bongkal-Sei Parit Kec. Sei Lala'	Santiyem, S.Pd.I	0813 78766624	
15	MTs S Asy Syakirin	Jl. Jend Sudirman Kec. Sei Lala'	Musliha,Hj. Dra	0813 71751994	
16	MTs S Al Hidayah	Kulim Jaya Kec. Lubuk Batu Jaya	Surasa	0813	

					65682093
17	MTs S Dusli Kelayang	Simp Kelayang Kec. Rakit Kulim	Nazaruddin, MN	0813 78816840	
18	MTs S Shirotul Huda	Jl. Negara Bukit Selanjut Kec. Kelayang	Marhadjas.B	0852 65208275	
19	MTs S Al Husin	Cenaku Kecil Kec. Batang Cenaku	Hamka Dinata, S.HI	0813 71887480	
20	MTs S Miftahul Jannah	Jl. Jend Sudirman kec. Peranap	Suardilan,Drs	0813 65401293	
21	MTs S Nurul Islam	Desa Talang Mulia Kec. Batang Cenaku	Minton S. A.Md	0813 65233223	
22	MTsS PP Nurul Huda	Desa Kulim Jaya Kec. Lubuk Batu Jaya	KH Ali Muhtarom		
Jumlah					

No	No Urut	Nama Madrasah	Alamat	Nama Kepala Sekolah	No HP
4	1	MAN Rengat	Jl. Gerbangsari Pematang Reba - Rengat Barat	Mariam, Dra	0813 71702969
	2	MAS Madinatun Najah	Jl. Narasinga No. 72 Rengat	Marlian, Hj. S.Ag	0813 71661758
	3	MAS Nurul Iman	Sei Beringin Kec. Rengat	Af Ahmad Mauluddin, S.Pi	0812 26628830
	4	MAS Hidayatullah	Jl. Hangtuh Km.22 Kec. Kuala Cenaku	Yudi Harianto,S.Pd.I	0852 71872131
	5	MAS Al Ikhsan	Jl. Ahmad Yani Buluh Rampai- Kec. Seberida	Herawati, S.Ag	0812 7548205
	6	MAS Al Islam	Jl. Letjen S. Parman Air Molek- Kec. Seberida	Jumiran, S.Ag	0813 71038751
	7	MAS Nurul Falah	Jl. Jend.Sudirman Air Molek I - Pasir Penyu	Hasanuddin Husin, H. BA	0812 6820343
	8	MAS Khairul Ummah	Jl. Jend Sudirman Batu Gajah- Pasir Penyu	Su'udi Nuhron, Drs	0813 65274592
	9	MAS Asy Syakirin	Jl. Jend Sudirman Kec. Sei Lala'	Idris,Drs	0813 65703501
	10	MAS Shirotul Huda	Jl. Negara Bukit Selanjut Kec. Kelayang	Kastuti,S.Ag	0813 65402496
	11	MAS Miftahul Jannah	Jl, Jend Sudirman Kec. Peranap	Zulman, Drs	0813 65390919
	12	MAS Darussuluh	Cenaku Kecil Kec. Batang Cenaku	Asnawardi, A. Ma	0812 68244574

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan

1. Pandangan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Keberadaan Madrasah Swasta

Populasi penelitian ini adalah masyarakat di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu. Oleh karena populasi tersebar secara luas dan agar memiliki ciri seperti yang dikehendaki dalam penelitian ini maka sejumlah masyarakat kecamatan Rengat dipilih secara *purposive sampling* (pemilihan responden berdasarkan tujuan tertentu).

Pemilihan ini, didasari dengan pertimbangan bahwa sample yang dipilih benar-benar mengetahui keberadaan Madrasah Yayasan Pendidikan Agama Islam Rengat dan perkembangannya, sampel penelitian terdiri dari 1) orang tua murid, 2) penduduk setempat.

Jumlah keseluruhan 107 responden. Hal ini guna melihat sejauh mana penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap Madrasah Yayasan Pendidikan Agama Islam Rengat dan hasil survey tersebut dapat dilihat dalam tabel IX pada lampiran.

Pendidikan agama di kalangan masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam melatarbelakangi kisi-kisi kehidupan, begitu juga pada masyarakat kecamatan Rengat, dapat dilihat dari tabel berikut:

Table I.**Jawaban Responden tentang Pentingnya Pendidikan Agama bagi Masyarakat**

Option	Alternatif Jawaban	F	%	Respon
A	Sangat setuju	89	83.17	
B	Setuju	8	7.47	
C	Ragu	6	5.60	
D	Tidak setuju	4	3.73	
E	Sangat tidak setuju	0	0	
		107	100	

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa alternatif pilihan sangat setuju 83,17% Setuju 7,47 % Rgu 5,60 % tidak setuju 3,73% dan Sangat tidak setuju 0%, maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan masyarakat memberikan respon sangat setuju (83.17%).

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mengakui dan berkeyakinan kehadiran madrasah swasta sebagai lembaga pendidikan Islam adalah sangat penting bagi mereka.

Karena semenjak awal pendiriannya, madrasah telah didesain dalam rangka membela dan mempertahankan kepentingan umat Islam melalui pendidikan. Madrasah adalah personifikasi kebutuhan umat Islam terhadap pelestarian nilai-nilai dan ajaran agamanya.

Dengan demikian, diharapkan madrasah adalah tempat penanaman nilai-nilai agama terhadap anak didiknya, selaku generasi muda untuk bekal hidup didunia dan akhirat.

Pendapat orang tua siswa sebagaimana diatas mencerminkan bahwa secara konsep pendidikan agama yang merupakan pendidikan nilai, termasuk didalamnya adalah pendidikan moral, sangat diperlukan oleh masyarakat.

Artinya, secara jujur orang tua siswa menginginkan agar memiliki kualitas moral dan akhlak yang baik dan terpuji, dimana hal itu hanya bisa diperoleh melalui pendidikan agama dan bukan yang lainnya.

Dengan demikian, konsep pembelajaran di madrasah senantiasa harus diarahkan pada perwujudan nilai-nilai ke-Islaman dalam seluruh totalitas aktivitas madrasah oleh peserta didiknya.

Namun demikian, kebutuhan yang dianggap penting tersebut belum tentu keberadaanya sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri, baik dari segi kuantitas (jumlah) madrasah yang ada di sekitar wilayah mereka, maupun juga kualitas yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini

Table II.
Deskripsi Kecukupan Kebutuhan Pendidikan Agama Bagi Anak Mereka
dengan Madrasah yang Ada di Rengat

Option	Alternatif Jawaban	F	%	Respon
A	Sangat setuju	24	22,42	
B	Setuju	17	15,53	
C	Ragu	61	57,01	
D	Tidak setuju	3	2,80	
E	Sangat tidak setuju	2	1,87	
		107	100	

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa alternatif pilihan Sangat setuju 22,42%, Setuju 15,53%, Ragu 57,01%, Tidak setuju 2,80% dan Sangat tidak setuju 1,87% hingga kecendrungan masyarakat memberikan respon ragu (53,01). Karena banyaknya responden yang memilih opsi C.

Hal ini menunjukkan bahwa, masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan agama bagi anak-anak mereka masih belum cukup. Ketidakcukupan tersebut meliputi kuantitas maupun kualitas pendidikan yang mereka idealkan.

Dari wawancara untuk mengklarifikasi masalah ini diperoleh informasi bahwa menurut sebagian tokoh maupun orang tua siswa, jika madrasah direposisi menjadi pendidikan umum dengan konsekuensi harus mengikuti standar Nasional pendidikan, yang secara jelas tidak mengikutsertakan mata pelajaran pendidikan agama sebagai salah satu standar kelulusan.

Oleh sebab itu, selain mengurangi jam pelajaran, maka dapat diartikan bahwa madrasah benar-benar tercabut dari akar budaya dan kebutuhan masyarakat muslim. Jadi, madrasah harus tetap dikembangkan menurut ukuran kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan pemerintah.

Tentang minimnya madrasah yang disediakan oleh pemerintah sehingga seringkali image tentang madrasah justru lebih banyak diselenggarakan oleh pihak swasta dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Table III.

**Pendapat Masyarakat tentang Status Madrasah yang Mereka Ketahui
Mayoritas Swasta**

Option	Alternatif Jawaban	F	%	Respon
A	Sangat setuju	23	21,50	
B	Setuju	61	57,01	
C	Ragu	19	17,76	
D	Tidak setuju	4	3,74	
E	Sangat tidak setuju	0	0	
		107	100	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa alternatif jawaban Sangat setuju 21,50%, Setuju 57,01%, Ragu 17,76%, Tidak setuju 3,74% dan Sangat tidak setuju 0%

Kecenderungan tersebut mencerminkan dan mengukuhkan pandangan masyarakat bahwa pada mereka terdapat image seolah-olah hampir tiap madrasah itu berstatus swasta. Kenyataan bahwa minimnya jumlah madrasah yang berstatus negeri menegaskan munculnya image yang begitu nyata ((lebih dari 70%) bahwa madrasah identik dengan pendidikan milik partikelir atau swasta.

Dari wawancara dengan beberapa tokoh pendidik diperoleh keterangan bahwa keberadaan madrasah swasta merupakan bukti nyata partisipasi masyarakat mewujudkan kecerdasan bangsa.

Madrasah memiliki kontribusi yang besar untuk kesuksesan program pemerintah menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dimana

madrasah menyerap siswa-siswi dari kalangan ekonomi menengah kebawah mengingat lokasi madrasah pada umumnya berada di wilayah pedesaan atau pinggiran kota.

Menanggapi keadaan tersebut beberapa kepala sekolah madrasah menilai bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk bersama-sama masyarakat membina dan mengembangkan madrasah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikannya. Bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kualitas pendidikan madrasah tidak harus diartikan dengan pengertian bahwa madrasah harus dinegerikan oleh pemerintah.

Terhadap persoalan kualitas pendidikan madrasah sebagian informan menilai bahwa saat ini ada beberapa madrasah swasta dengan manajemen pendidikan modern justru lebih unggul dan maju dari sekolah umum negeri sekalipun. Terhadap keadaan yang demikian memang dapat dikatakan bahwa tidak ada jaminan ketika madrasah dinegerikan lalu dengan sendirinya ia akan semakin lebih baik mutunya.

Sebab, saat ini pun madrasah negeri yang bagus dapat dihitung dengan jari, sementara madrasah swasta yang bermutu pun berada diberbagai tempat. Madrasah swasta tetap dengan statusnya, namun pemerintah diharapkan mendukung sarana prasarannya, mencukupi kebutuhan gurunya serta memberikan pelatihan-pelatihan tentang pengembangan manajemen pendidikan bermutu, misalnya.

Table IV.
Manajemen Madrasah Variatif

Option	Alternatif Jawaban	F	%	Respon
A	Sangat setuju	22	20,56	
B	Setuju	20	18,69	
C	Ragu	47	43,93	
D	Tidak setuju	16	14,95	
E	Sangat tidak setuju	2	1,87	
		107	100	

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa alternative jawaban Sangat setuju 20,56%, Setuju 18,69%, ragu 43,93%, Tidak setuju 14,95% Dan Sangat tidak setuju 1,87%, sehingga kecenderungan masyarakat memberikan respon ragu (43,93 %) terhadap pernyataan diatas. Alasannya, sebagai lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, maka merupakan suatu hal wajar jika penyelenggaraan madrasah swasta bervariasi menurut ukuran kebutuhan dan kemampuan masyarakat itu sendiri.

Sebagaimana dimaklumi, daya dukung (financial) masyarakat terhadap madrasah swasta dinilai lemah, namun kelemahan itu bukanlah dalam artian tidak adanya semangat yang tinggi dari masyarakat, sebab semua itu lebih didasarkan karena kemampuan ekonomi masyarakat yang lemah.

Banyak juga madrasah yang didirikan oleh pondok pesantren dengan gaya 'manajemen khas pesantren'. Ada madrasah yang dikembangkan oleh

ormas-ormas ke-Islaman seperti NU, Muhammadiyah, dll. Pengelolaan madrasah dibawah ormas tentu saja mewarisi”gaya pengelola” ormas itu sendiri.

Pengembangan model pengelola madrasah swasta tetap harus diposisikan sebagai suatu hal yang relevan dengan manajemen pendidikan saat ini dilihat dari sudut pandang adanya kemampuan masyarakat mengelola lembaga pendidikan secara mandiri dan otonom, tanpa selalu mengharapkan ‘sentuhan’ pemerintah.

Menurut pandangan kepala madrasah, kewenangan untuk mengelola sendiri segala kebutuhan pendidikan madrasah, merupakan salah satu aspek manajemen pendidikan madrasah, dan hal itu sebenarnya tradisi yang sudah lama dikembangkan oleh penyelenggara madrasah. Hanya saja, memang dalam berbagai aspek manajemen lainnya, masyarakat perlu dibantu agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki.

Tabel V.

Deskripsi Minat Responden Menyekolahkan Anaknya ke Madrasah

Option	Alternatif Jawaban	F	%	Respon
A	Sangat setuju	11	10,28	
B	Setuju	24	22,43	
C	Ragu	59	55,14	
D	Tidak setuju	6	5,61	
E	Sangat tidak setuju	7	6,52	
		107	100	

Berdasarkan hasil tabel di atas alternatif jawaban Sangat setuju 10,28%, Setuju 22,43% Ragu 55,14%, Tidak setuju 5,61%, Sangat tidak setuju 6,52% sehingga kecenderungan masyarakat memberikan respon ragu (55.14 %).

Secara umum dapat dikatakan bahwa minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka ke madrasah tergolong rendah. Hal ini terlihat dari total responden yang memilih opsi ragu-ragu ditambah dengan responden yang memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju melebihi angka 60%.

Hal tersebut berbeda dengan responden yang memilih opsi sangat setuju dan opsi setuju hanya mencapai 30% dari total responden yang memilih dan mengembalikan angket. Data seperti di atas tentunya sangat berbeda dengan data tentang anggapan mereka sendiri terhadap pentingnya pendidikan agama yang mayoritas mengakui pentingnya hal tersebut.

Terhadap fenomena seperti di atas perlu dipahami bahwa ada perbedaan pada tataran konsep atau tingkat pandangan tentang pentingnya pendidikan agama tetapi ketika pada tataran praktis harus memilih jenis pendidikan bagi anak-anak mereka, masyarakat juga mempertimbangkan hal-hal lain yang bukan hanya masalah agama. Patut diduga bahwa masyarakat juga mempertimbangkan hal lain, seperti sarana prasarana, mutu lulusan dan lain-lain.

Tabel VI.

Deskripsi Alasan Menyekolahkan Anak Ke Madrasah Diniyah

Option	Alternatif Jawaban	F	%
A	Untuk membekali Ilmu Agama	8	7,48
B	Karena membekali Agama dan Umum sekaligus	75	70,09
C	Karena tidak di terima di tempat lain	20	18,69
D	Daripada tidak sekolah	4	3,74
E	Tidak tahu	0	0
		107	100

Dari table di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang memilih memasukkan anaknya ke madrasah di dominasi oleh orang-orang yang mengharapkan nilai-nilai pendidikan agama bagi anak-anak mereka lebih dominan yakni (75%) dan (8%), dan dari data tersebut tergambar bahwa mayoritas warga masyarakat memiliki alasan untuk anak mereka memperoleh pendidikan agama sekaligus umum.

Selain itu terdapat 20% responden yang memasukkan anaknya ke madrasah karena alasan lain yakni karena tidak diterima di sekolah lain (umum negeri).

Terhadap pertanyaan ini, reposisi madrasah swasta yang di kelola oleh yayasan sebagai lembaga pendidikan menurut UU No.16 Tahun 2001 tentang yayasan cenderung menurun hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap yayasan tersebut sangat lemah, yayasan hanya mampu mendirikan

lembaga pendidikan tetapi dalam menjalankan fungsinya yayasan banyak yang belum mengerti.

Tabel VII.
Pandangan Masyarakat tentang Madrasah Swasta yang Mengadopsi Kurikulum Nasional

Option	Alternatif Jawaban	F	%	Respon
A	Sangat setuju	4	3,74	
B	Setuju	20	18,69	
C	Ragu	75	70,09	
D	Tidak setuju	8	7,48	
E	Sangat tidak setuju	0	0	
		107	100	

Dari hasil tabel diatas dapat dipahami bahwa pilihan responden terhadap opsi atau alternative jawaban Sangat setuju sebesar 3,73%, responded yang memilih opsi jawaban Setuju 18,69%, serta responden yang memilih opsi jawaban Ragu 70,09%, Tidak setuju 7,44% dan Sangat tidak setuju 0% .

Kecenderungan masyarakat memberikan respon ragu atau ragu-ragu, yakni sebesar 75 responden (70.09%). Menunjukkan bahwa masyarakat masih menginginkan identitas keislaman yang melekat pada madrasah harus tetap dipertahankan. Hanya sebagian masyarakat yakni 20% meyakini bahwa madrasah memang harus mengadopsi kurikulum nasional sebagai bentuk pembaharuan pendidikannya.

Kedua, bentuk kepedulian pemerintah tidak mesti dalam bentuk pengintegrasian sistemik, melainkan dalam hal supporting kelembagaan dan peningkatan mutu tanpa mengurangi independensi madrasah swasta. Masuknya madrasah kedalam sistemik pendidikan seharusnya bermanfaat bagi peningkatan kualitas madrasah swasta bukan sebaliknya, menghilangkan jati diri madrasah sebagai lembaga pendidikan Indonesia, karena beranggapan bahwa masalah agama dan pendidikan agama adalah wilayah pribadi masing-masing individu.

Ketiga, ketika madrasah swasta dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah, nyatanya jam pelajaran agama menjadi berkurang, dan demikian ciri khas madrasah hilang. Padahal, madrasah melayani kebutuhan pendidikan bagi siswa yang jauh lebih besar dibanding lembaga sekolah.

Menurut orang tua siswa, masuknya madrasah kedalam sistemik Pendidikan Nasional belum dapat dikatakan sebagai bentuk kepedulian pemerintah, manakala pemerintah belum dapat memberikan sesuatu yang berarti bagi umat Islam, mengingat tanpa intervensi pemerintah pun, madrasah sudah berjalan sejak dahulu.

Artinya, intregasi madrasah kedalam sistemik pendidikan nasional, harus dibuktikan dengan kesungguhan pemerintah membantu pengembangan madrasah dan mencukupi segala kebutuhannya, selain yang paling utama adalah mempertahankan jati diri madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam.

Tabel VIII.
Pandangan Masyarakat tentang Pengelolaan Madrasah oleh Yayasan dan Rendahnya Tingkat Mutu Madrasah.

Option	Alternatif Jawaban	F	%	Respon
A	Sangat setuju	24	22,43	
B	Setuju	36	33,64	
C	Ragu	21	19,63	
D	Tidak setuju	20	18,69	
E	Sangat tidak setuju.	6	5,61	
		107	100	

Hasil table diatas menunjukkan bahwa alternatif memilih jawaban Sangat setuju 22,43%. Setuju 33,64%, Ragu 19,63%, Tidak setuju 18,69%, dan Sangat tidak setuju 5,61%. Artinya, sebagian besar masyarakat berpendapat atau memiliki pandangan bahwa posisi madrasah swasta masih dilihat pada posisi ke dua atau ketiga setelah yang lain atau lebih tepatnya sekolahan negeri. Alasannya, para orang tua saat ini sudah sangat kritis dan selektif dalam memilih lembaga pendidikan untuk anak-anaknya. Selama ini alasan para orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke madrasah lebih karena contents pendidikan agama yang diberikan madrasah pada anak didiknya.

Alasan diatas dikuatkan pendapat orang tua bahwa posisi madrasah swasta menjadi lembaga pendidikan jika tidak di kelola dengan baik hal ini menyebabkan para orang tua tidak dapat lagi membedakan antara madrasah dengan sekolah lain. Karena itu, mengingat madrasah sudah sama dengan

sekolah umum, maka untuk mendapatkan pendidikan umum yang baik bagi anak-anaknya para orang tua cenderung akan memilih lembaga sekolah.

Tabel IX.
Pandangan Masyarakat tentang Sarana Prasarana Madrasah Negeri Lebih baik dibanding Madrasah Swasta atau Yayasan

Option	Alternatif Jawaban	F	%	Respon
A	Sangat setuju	10	9,35	
B	Setuju	18	16,82	
C	Ragu	53	49,53	
D	Tidak setuju	15	14,02	
E	Sangat tidak setuju	11	10,28	
		107	100	

Hasil tabel di atas diketahui bahwa alternative memilih jawaban Sangat setuju 9,35%, Setuju 16,82%, Ragu 49,53%, Tidak setuju 14,02% dan Sangat tidak setuju 10,28%. Sehingga kecenderungan masyarakat memberikan respon ragu (49,53%) terhadap pernyataan di atas. Alasannya, yayasan merupakan tolak ukur keberhasilan dalam peningkatan mutu pendidikan.

Jika madrasah menggunakan yayasan yang baik, maka madrasah akan lebih kompetitif, sehingga dapat membangun percaya diri untuk bersaing dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikannya. Hanya saja, standarisasi dengan tidak mengurangi apalagi menghilangkan pembelajaran agama di madrasah.

Jadi, kurikulum yang digunakan tetap berbasis pada pendidikan agama, karena itu adalah nilai keunggulan madrasah yang dibutuhkan masyarakat. Pendeknya, mata pelajaran agama dimadrasah, seperti Al-Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Bahasa Arab, Fiqh Ushul Fiqh dan SKI harus diakomodir dalam standar nasional pendidikan, sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, tidak direduksi menjadi PAI saja.

Selain itu, kriteria standarisasi itu harus disepakati dulu, karena tidak mungkin mengukur sesuatu dengan suatu kriteria yang berbeda. Menurut logika 'orang kampung', bagaimana mungkin mengukur kompetisi kuda dan kerbau dengan ukuran yang sama?

Departemen agama harus merumuskan kebijakan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bagaimana visi dan misi madrasah, apa tujuannya, kurikulum apa yang digunakan, output seperti apa yang diinginkan, bagaimana dengan sarana dan prasarana pendidikannya, apa sudah tercukupi? Kalau semua itu sudah fit, baru bisa bicara standar nasional pendidikan. Pernyataannya, adakah SNP sudah sesuai dengan visi dan misi madrasah yang diinginkan.

Tabel X.
Departemen Agama tidak Perlu Membedakan antara Madrasah Negeri
dengan Madrasah Swasta

Option	Alternatif Jawaban	F	%	Respon
A	Sangat setuju	15	14.02	
B	Setuju	29	27,10	
C	Ragu	49	45.79	
D	Tidak setuju	12	11,21	
E	Sangat tidak setuju.	2	1,87	
		107	100	

Dari tabel diatas diketahui bahwa alternative pilihan jawaban Sangat setuju 14,02%, Setuju 27,10%, Ragu 45,79%, Tidak setuju 11,21%, dan Sangat tidak setuju 1,87%. Sehingga kecenderungan masyarakat memberikan respon ragu (45.79%) terhadap pernyataan diatas.

Alasannya, Deprtemen Agama harus mentaati undang-undang bahwa tidak ada dikotomi antara madrasah negeri dan swasta. Faktanya, jumlah madrasah swasta lebih besar dibandingkan negeri, tapi Departemen Agama lebih memperhatikan Madrasah Negeri dibanding swasta, meskipun masih dalam satu departemen.

Pada beberapa kasus di daerah, terkadang bantuan untuk madrasah lebih sering diterima dari Dinas Pendidikan atau Pemerintah Daerah bukan dari Departemen Agama dengan jumlah yang cukup signifikan. Bahkan banyak

madrasah yang tidak pernah sama sekali mendapatkan bantuan Departemen Agama, apalagi setelah ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Menurut pendapat orang tua siswa, Departemen Agama seharusnya berterima kasih kepada masyarakat yang telah ikut membantu pekerjaan menyelenggarakan pendidikan, karena itu, antara Departemen Agama dan masyarakat harus terjalin kerjasama yang erat dalam mengembangkan madrasah.

Tabel XI.

Pengelolaan Madrasah Swasta oleh Yayasan Merupakan bentuk Kepedulian Masyarakat terhadap Pendidikan Islam.

Option	Alternatif Jawaban	F	%	Respon
A	Sangat setuju	19	17,67	
B	Setuju	26	24,18	
C	Ragu	47	43,71	
D	.Tidak setuju	13	12,07	
E	Sangat Tidak Setuju	2	1,86	
		107	100	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa alternative jawaban Sangat setuju 17,67%,Setuju 24,18%, Ragu 43,71%, Tidak setuju 12,07% dan Sangat tidak setuju 1,86%. Sehingga kecendrungan masyarakat memberikan respon ragu (43,71 %) terhadap pernyataan di atas. Alasannya, pengelolaan dan pengembangan madrasah swasta oleh masyarakat di bawah yayasan pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap pengembangan madrasah itu sendiri.

Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah bahwa madrasah swasta di kabupaten Indragiri Hulu lebih banyak dari pada madrasah negeri oleh karena itu

pengelolaan madrasah tidak mungkin bisa di tangani oleh pemerintah. Peran masyarakat disini sangat diperlukan sehingga madrasah yang ada di masyarakat akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dari penjelasan di atas dapat di rekapitulasi dalam tabel di bawah ini, yaitu

Rekapitulasi Angket tentang Pandangan Masyarakat terhadap Madrasah Swasta.

Tabel XI.
Rekapitulasi Hasil Analisa Tabel 1 – 10.

No.	Tabel	A		B		C		D		E	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	I	89	83,18%	8	7,48%	6	5,61%	4	3,74%	0	0,00%
2.	II	24	22,43%	17	15,89%	61	57,01%	3	2,80%	2	1,87%
3.	III	23	21,50%	61	57,01%	19	17,76%	4	3,74%	0	0,00%
4.	IV	22	20,56%	20	18,69%	47	43,93%	16	14,95%	2	1,87%
5.	V	11	10,28%	24	22,43%	59	55,14%	6	5,61%	7	6,54%
6.	VI	8	7,48%	75	70,09%	20	18,69%	4	3,74%	0	0,00%
7.	VII	4	3,74%	20	18,69%	75	70,09%	8	7,48%	0	0,00%
8.	VIII	24	22,43%	36	33,64%	21	19,63%	20	18,69%	6	5,61%
9.	IX	10	9,35%	18	16,82%	53	49,53%	15	14,02%	11	10,28%
10.	X	15	14,02%	29	27,10%	49	45,79%	12	11,21%	2	1,87%
Jumlah		230	215%	308	288%	410	383%	92	86%	30	28%
Rata-rata		23	21%	31	29%	41	38%	9,2	9%	3	3%

B. Analisis Hasil Penelitian

Dari paparan tabel rekapitulasi di atas tentang pandangan masyarakat Indragiri Hulu terhadap keberadaan madrasah swasta dapat dikategorikan dalam persentasi *Ragu atau sedang* (38 %), dengan alasan, sebenarnya masyarakat Indragiri Hulu tidak bisa menghindarkan diri dari proses modernisasi terhadap perkembangan madrasah swasta. Karena madrasah swasta lahir dari, oleh dan untuk masyarakat.

Dengan konteks ini masyarakat Indragiri Hulu sangat mendukung gagasan modernitas pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari madrasah dan, kebangkitan gagasan modernisme Islam yang memiliki kerangka dasar bahwa modernisasi pemikiran dan kelembagaan Islam merupakan prasyarat kebangkitan kaum muslim di masa depan.

Namun, modernisasi sistem dan kelembagaan Islam berlangsung nyaris tanpa melibatkan wacana epistemologis. Ia cenderung diadopsi dan diterapkan begitu saja, secara *hukum* dan parsial. Sebab itulah apa yang disebut modernisasi lembaga pendidikan cenderung involutif, sekedar perubahan-perubahan yang hanya memunculkan berbagai kerumitan masyarakat baru dari pada sejumlah strategi yang bisa dipertanggung jawabkan.

Di antara contoh yang paling mengemuka adalah apa yang menjadi bahasan utama dalam bahasan ini, yaitu reposisi madrasah swasta pandangan masyarakat Indragiri Hulu, dan peran yayasan dalam mengambil Kebijakan, ini ternyata menimbulkan sejumlah persoalan krusial di lapangan yang perlu dituntaskan, jika

tidak ingin dikatakan bahwa kebijakan Pemerintahan tentang pendidikan madrasah justru mempersulit pengembangan madrasah swasta, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal berikut:

1. Pandangan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu tentang Keberadaan Madrasah Swasta Khususnya di Rengat

Madrasah dengan sejuta masalahnya memang tetap menarik untuk diperbincangkan. Madrasah dengan mayoritas swasta di Indragiri Hulu adalah lembaga pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat, yang masih sangat dianggap penting keberadaannya oleh masyarakat.

Terutama karena posisi madrasah tersebar hingga ke daerah-daerah terpencil, maka otomatis madrasahlah yang melayani kebutuhan pendidikan untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Karena itulah di Indragiri Hulu madrasah sangat membutuhkan dukungan pemerintah.

Ini tidak dapat diartikan bahwa Pemerintah harus menegerikan madrasah swasta. Karena pokok masalah bukan pada negeri atau swasta, melainkan sejauh mana peran serta Pemerintahan mendukung aktivitas pendidikan madrasah sekaligus menghormati hak otonomnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, tinggi rendahnya partisipasi masyarakat terhadap madrasah masih sangat tergantung oleh cara pandang mereka terhadap madrasah, namun secara umum mereka lebih seuka memasukkan anak mereka ke madrasah karena alasan lembaga ini dapat memberikan pendidikan multi yakni agama dan umum sekaligus.

Pendidikan Islam tidak terbatas pada label Islam atau lembaga ke-Islaman, seperti pondok pesantren atau madrasah juga tidak terbatas pada pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam, seperti tafsir, hadis, fiqh dan tashawuf. Pendidikan Islam mencakup semua aktivitas, mulai dari konsep, visi, misi, institusi, kurikulum, metodologi, proses pembelajaran, SDM kependidikan, lingkungan pendidikan dan lain sebagainya, yang disemangati dan bersumber pada ajaran dan nilai-nilai Islam, yang masuk dalam proses seluruh aktivitas pendidikan.

Tingkat partisipasi masyarakat untuk memasukkan anaknya ke madrasah, membantu dan ikut serta dalam menanggulangi keperluan madrasah dalam operasional mereka, masih bergantung pada kemampuan madrasah swasta dalam menjaga dan mempertahankan Mutu pendidikannya.

Sudah barang tentu yang diharapkan pengelolaan madrasah swasta maupun orang tua siswa adalah madrasah yang memiliki keunggulan akademik dengan basis keagamaan yang kuat, dapat menjadi tauladan, serta dipercaya dan dicintai oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa identitas madrasah swasta sebagai lembaga yang memproduksi lulusan yang memiliki nilai keagamaan yang kuat, lalu tidak menjadi lemah ketika memperoleh pengakuan sama atau setara dengan sekolah pada umumnya.

Hasil penelitian ini menguatkan tentang manajemen madrasah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah yang diharapkan oleh stakeholder madrasah harus berlandaskan kepada nilai-nilai yang menjadi panutan seluruh masyarakat pendukung madrasah itu sendiri. Nilai merupakan keyakinan dasar

dan menjadi landasan berfikir dan bertindak yang akan mengarahkan perilaku seseorang kepada apa yang menurutnya baik dan benar.

Oleh karena itu, dapat dipahami pandangan masyarakat Indragiri Hulu terhadap madrasah, baik kepala madrasah maupun orang tua siswa, terhadap pengurangan jumlah jam pelajaran ilmu-ilmu ke-Islaman di madrasah, selain mereduksikan menjadi pendidikan Agama Islam yang menyebabkannya menjadi umum dan dangkal.

Masalahnya tidak selesai sampai di situ, karena yang utama adalah sejauh mana kemungkinan siswa madrasah memperoleh pendidikan nilai (agama) dalam kerangka menjaga integritas moral – spritualnya, padahal dampak dunia global saat ini hanya mampu diimbangi dengan keteguhan moralitas.

Pada tataran praktis, muncul pertanyaan besar, jika madrasah swasta itu tidak lagi nampak, lalu dimanakah fungsi yayasan yang menaunginya sesuai dengan UU No.16 tahun 2001 ? Sebab Yayasan yang note bene menghidupkan madrasah swasta di kabupaten Indragiri Hulu kurang memperhatikan kualitas pembelajaran agama sehingga pihak sekolah sebagai pelaku berjalan sendiri.

Pada akhirnya, madrasah swasta di Indragiri Hulu tetap harus didekati melalui nilai internal jati dirinya, karakter, kebutuhan sekaligus kekuatan dan kelemahannya. Sebab madrasah sebagaimana yang dijelaskan oleh Karl Stenbrink dalam buku "Pesantren Madrasah dan Sekolah" dalam sejarahnya merupakan perkembangan dari lembaga pendidikan Islam sebelumnya, yaitu

pesantren. Dengan demikian, madrasah berkewajiban mengembangkan visi dan misi asasi pesantren, yaitu *tafaqquh fid-din*.

2. Pandangan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Reposisi Madrasah.

Saat ini dan ke depan, keadaan masyarakat Indragiri Hulu diperkirakan akan semakin bebas dalam persaingan mendirikan lembaga pendidikan. Pasar bebas menjadi ciri utama masyarakat majemuk, terbuka dan maju. Di antara kecenderungan yang paling menonjol adalah tuntutan ekonomi yang semakin besar sejalan dengan proses modernisasi dan industrialisasi yang semakin pesat sehingga pendidikan sering diidentikan dengan pembangunan sumber daya manusia yang siap terjun dibidang ekonomi.

Keadaan tersebut sebagaimana data tentang kecenderungan masyarakat memiliki animo yang tinggi terhadap lembaga pendidikan yang mampu menyuguhkan nilai-nilai keagamaan (keislaman) sekaligus ilmu-ilmu umum dan praktis, merupakan kesempatan yang harus dijawab peranannya oleh madrasah khususnya swasta terutama di daerah yang kehadiran madrasah negeri sangat sedikit.

Dalam kondisi demikian, madrasah swasta di Indragiri Hulu dituntut lebih dari sekedar menjalankan peran yang selama ini sudah dialamatkan kepadanya. Persaingan bebas akan menuntut madrasah dapat memberikan andil bagi pemenuhan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Madrasah harus dapat melayani kebutuhan pendidikan yang lebih beragam bagi lebih banyak orang dengan kandungan pendidikan (*Content*),

metode dan pola penyampaian pembelajaran yang merelevansikan jenis dan bentuk-bentuk baru yang berhubungan dengan masyarakat yang lebih luas.

Artinya, pengembangan madrasah swasta di Indragiri Hulu harus berkiblat pada konteks perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, baik pada tataran konsep maupun paradigma pendidikan nasional itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, pengembangan madrasah harus mempertimbangkan kondisi sosial, politik dan ekonomi global.

Saat ini, sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, madrasah secara keseluruhan tidak bisa mengalokasikan diri dari perubahan-perubahan paradigma, konsep, visi dan orientasi baru pengembangan pendidikan.

Kedepan madrasah swasta di Indragiri Hulu perlu diarahkan kepada posisinya sebagai sarana untuk melakukan transfer nilai-nilai Islam dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia (*transfer of values*), transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), terutama di bidang kajian ke-Islaman, sekaligus transfer keterampilan (*transfer of skill*).

Saat ini, meski dengan tertatih-tatih, posisi madrasah swasta sebagai media transfer nilai dan pengetahuan telah mendapatkan perannya yang tidak dapat diabaikan, namun madrasah sebagai bentuk transfer keterampilan yang memang berkaitan dengan lapangan pekerjaan, nampaknya masih dalam proses pencarian.

Seperti halnya respon masyarakat Indragiri Hulu terhadap pernyataan yang berkaitan dengan jati diri madrasah swasta respon masyarakat terhadap pernyataan yang berkaitan dengan reposisi madrasah pun selalu didukung dan diamini oleh respon orang tua siswa.

Bahkan dalam beberapa hal, seringkali alasan yang dibangun oleh orang tua siswa lebih tajam dan terkesan militan dibandingkan kepala madrasah. Ini dapat dipahami, mengingat orang tua siswa sebagai pengguna pendidikan madrasah memelihara kepentingan dan kebutuhan mereka. Misalnya, masalah kurikulum ilmu-ilmu ke-Islaman yang seringkali dikaitkan dengan aspek moralitas dan kewajiban agar anak-anaknya tetap menjadi anak-anak yang baik.

Namun demikian, jika madrasah swasta tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya pendidikan yang berkualitas baik dalam pembelajaran maupun pengelolaannya, maka hal tersebut justru jadi bumerang bagi para pengelola madrasah, karena kemungkinan besar akan ditinggalkan peminatnya. Hal ini belum lagi jika dihadapkan kepada masalah persaingan antar madrasah dan sekolah umum yang kebanyakan di bawah pengelolaan pemerintah.

Oleh karena itu para pengelola yayasan maupun pemerintah yang menangani pendidikan madrasah dengan ekspektasi sedemikian rupa perlu mengetahui :

a. Visi dan Misi Madrasah

Perubahan struktur kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang berkeinginan untuk mewujudkan masyarakat madani, yakni suatu masyarakat yang berbasis komunitas (*community based society*) yang religius, beradab serta menghargai harkat dan martabat manusia.

Dalam konsep masyarakat yang berbasis komunitas dikandung pengertian bahwa pendidikan harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi arah perubahan masyarakatnya, dan tugas pendidikan adalah membantu masyarakat menuju perubahan yang diinginkan itu.

Pada uraian berikut dikemukakan rumusan visi dan misi pendidikan di madrasah dengan mempertimbangkan berbagai hal, yaitu

- (1) Nilai-nilai normatif, religius, filosofis yang diyakini kebenarannya;
- (2) Lingkungan strategis; serta
- (3) Sejumlah isu strategis bangsa.

Rumusan visi dan misi berikut menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dasar dan strategi implementasi yang dikemukakan pada bagian selanjutnya.¹

Visi madrasah merupakan suatu pandangan atau keyakinan bersama seluruh komponen madrasah akan keadaan masa depan yang diinginkan.

¹2. *Ibid*, hal 14.

Visi ini diungkapkan dengan kalimat yang jelas, positif, menantang, mengundang partisipasi dan menunjukkan gambaran tentang masa yang akan datang. Keberadaan visi ini akan menjadi inspirasi dan mendorong seluruh warga madrasah untuk bekerja lebih giat.

Oleh karena itu, secara fungsional, visi memiliki beberapa fungsi strategis. *Pertama*, visi diperlukan untuk memobilisasi komitmen, menciptakan *energi for action*, memberi *road map* untuk menuju masa depan, menimbulkan *antusiasme*, memusatkan perhatian dan menanamkan kepercayaan diri.

Kedua, visi diperlukan untuk menunjang proses *reengineering*, *restructuring*, *reinventing*, *benchmarking*. *Ketiga*, visi diperlukan untuk menciptakan dan mengembangkan *shared mindsets* atau *common vision* yang menentukan dan menjadi landasan bagaimana seluruh individu mempersepsikan dan berinteraksi dengan *stakeholdersnya*.

Selanjutnya untuk mengoperasionalkan fungsi-fungsi strategisnya, maka visi tersebut dikembangkan kedalam misi. Misi dapat difahami sebagai pernyataan formal tentang tujuan utama yang akan direalisasikan. Maka, misi merupakan upaya untuk mengkritisi visi dalam wujud tujuan dasar yang akan diwujudkan.

Visi dan misi madrasah; Kepala madrasah, guru, staf madrasah, para murid dan orang tua murid, dengan pertanyaan-pertanyaan : Mengapa kita berada di madrasah? Apa yang harus kita perbuat ? Bagaimana kita

melaksanakan? Bagi kepala madrasah harus selalu ditantang dengan pertanyaan : mengapa dan untuk apa saya menjadi kepala madrasah ? Apa yang harus saya kerjakan sebagai kepala madrasah ? Bagaimana saya melakukan pekerjaan tersebut? Pertanyaan akan muncul bagi guru : Mengapa dan untuk apa saya menjadi guru? Apa yang harus saya kerjakan sebagai guru ? Bagaimana saya melaksanakan pekerjaan tersebut ? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mendorong seluruh warga madrasah, sesuai dengan kapasitas dan fungsi masing-masing bekerja keras berdasarkan misi guna mendekati visi madrasah.

b. Visi Pendidikan Madrasah

Visi Makro Pendidikan madrasah

Visi makro pendidikan madrasah adalah *terwujudnya masyarakat dan bangsa Indonesia yang memiliki sikap agamis, berkemampuan ilmiah-amaliah, terampil dan profesional.*²

Visi Mikro Pendidikan Madrasah

Visi mikro pendidikan madrasah adalah *terwujudnya individu yang memiliki sikap agamis, berkemampuan ilmiah-diniyah, terampil dan profesional sesuai dengan tataran kehidupan.*³

Pendidikan madrasah swasta di Indragiri Hulu diharapkan mampu menghasilkan manusia dan masyarakat daerah yang memiliki sikap agamis,

² *ibid*,h 16.

³ *ibid*.h. 22.

berkemampuan ilmiah-amaliah, terampil dan profesional, sehingga akan senantiasa sesuai dengan tatanan kehidupan.

Tujuan yang demikian mulia ini, mempersyaratkan kepedulian semua pihak, dari mulai keluarga, masyarakat, serta organisasi dan institusi pendidikan madrasah yang unggul. Selanjutnya, untuk memberikan bobot yang relevan dengan tatanan kehidupan, maka dapat ditambahkan bahwa pendidikan madrasah semestinya berorientasi lokal agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat sekitar, berwawasan nasional agar secara sentripetal tetap mengarah kepada tercapainya misi nasional, serta berwawasan global agar dalam jangka panjang memiliki kemampuan untuk bersaing secara internasional.

c. Misi Pendidikan Madrasah

Visi makro dan mikro pendidikan madrasah, selanjutnya dapat dijabarkan dan disederhanakan menjadi tiga butir rumusan, sekaligus sebagai profil lulusan madrasah yang diharapkan :

- 1) *Menciptakan calon agamawan yang berilmu;*
- 2) *Menciptakan calon ilmuwan yang beragama;*
- 3) *Menciptakan calon tenaga terampil yang profesional dan agamis.*⁴

Dengan misi kelembagaan tersebut diatas, maka menuntut akan adanya pematapan mekanisme sistem pendidikan madrasah, yang

⁴, *Ibid* hal.17

berimplikasi pada tuntutan kualitatif pada semua komponen pendidikan madrasah. Mengingat luasnya cakupan perbaikan sistem pendidikan madrasah, maka target pencapaian ketiga misi diatas dibedakan kedalam 3 (tiga) rentang waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pada jangka pendek, prioritas pertamanya adalah melanjutkan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Selanjutnya, peningkatan kemampuan kelembagaan dan peningkatan kemampuan penguasaan iptek merupakan prioritas kedua dan ketiga dalam misi jangka pendek.

Penekanan pada jangka menengah adalah memantapkan, mengembangkan, dan melembagakan secara berkelanjutan dari apa yang telah dirintis pada jangka pendek, baik berupa masyarakat dan sistem pendidikan yang lebih berdaya, perbaikan aspek kelembagaan dan manajerial, maupun perbaikan substansi yang terkandung dalam sistem pendidikan di madrasah swasta.

Penekanan pada jangka panjang, adalah pembudayaan bagi terbentuknya nilai-nilai baru, dalam keseimbangan yang baru, dan dalam konteks struktur masyarakat Indragiri Hulu yang baru. Perubahan tatanan budaya dalam kehidupan membutuhkan waktu, dan oleh karena itu, pembudayaan sebagai hasil pemberdayaan sistem pendidikan di madrasah swasta dituangkan dalam jangka panjang. Pembudayaan mengimplikasikan

bahwa yang terjadi bukan hanya konservasi budaya, melainkan sebuah proses yang bersifat aktif-kreatif dan berkelanjutan, selaras dengan perkembangan tatanan kehidupan.

d. Arah dan Kerangka Pengembangan Madrasah di Kabupaten Inhu

Kenyataan menunjukkan bahwa pada saat ini, telah terjadi reduksi pemaknaan pendidikan, kenyataan ini sudah seharusnya dikembalikan kepada makna yang sesungguhnya dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan, sesuai dengan visi yang diembannya harus mencerminkan kemampuannya untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan peran yang multidimensional.

Bertolak dari kenyataan tersebut, arah pengembangan pendidikan di madrasah bertujuan untuk dapat “ *Mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara* “.⁵

Spektrum tujuan pendidikan madrasah sebagaimana disebutkan diatas yang sejalan dengan kemajuan masyarakat Indragiri Hulu memerlukan penjabaran bagi pelaksanaannya pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, sebagaimana dikemukakan berikut :

Pendidikan Dasar yang meliputi Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Indragiri Hulu menekankan

⁵ *Ibid* hal. 20

kemampuan umum yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat dan bernegara.

Materi pendidikan tingkat dasar di madrasah ini lebih mengutamakan pada pembekalan kemampuan yang fungsional untuk kehidupan dalam berbagai bidang : sosial, budaya, ekonomi, dengan berbasis pada nilai-nilai ajaran agama Islam.

Sejalan dengan semakin kompleksnya tantangan kehidupan, maka pendidikan dasar di Indonesia adalah sembilan tahun. Asumsinya adalah, apabila pendidikan minimum ini tidak dicapai, maka seseorang akan mengalami kesulitan dalam mengikuti perkembangan di sekelilingnya.

Pendidikan menengah di madrasah, secara kelembagaan dibedakan menjadi Madrasah Aliyah (pada umumnya), Madrasah Aliyah Program Keagamaan, dan Madrasah Program Keterampilan. Tujuan utama Madrasah Aliyah adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi.

Madrasah Aliyah program Keagamaan adalah untuk mempersiapkan peserta didik yang mampu dalam pengetahuan agama, dan Madrasah Aliyah program Keterampilan adalah untuk mempersiapkan peserta didiknya untuk memasuki dunia kerja. Meskipun demikian, harus tetap ada fleksibilitas pada ketiga jenis jenis program pendidikan di Madrasah Aliyah ini. Artinya, diantara ketiga jenis program ini tidak perlu ada pemilahan yang terlalu tajam. Dalam kondisi tertentu misalnya, lulusan Madrasah Aliyah program

Keterampilan, dimungkinkan untuk meneruskan ke pendidikan tinggi, sebaliknya lulusan Madrasah Aliyah (pada umumnya) dengan pembekalan tertentu memiliki kemampuan untuk memasuki dunia kerja. Berdasarkan prinsip fleksibilitas ini, suatu saat kelak sangat mungkin hanya ada satu jenis pendidikan Madrasah Aliyah komprehensif, yang dapat memberikan kemampuan akademik untuk studi lanjutan dan sekaligus layanan keterampilan untuk memasuki dunia kerja, sesuai dengan minat, kebutuhan dan kemampuannya. Dalam model ini, ada kelompok mata pelajaran pokok yang wajib ditempuh oleh semua peserta didik, dan ada kelompok mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik.

Mata Pelajaran pilihan tidak bersifat paket, melainkan fleksibel. Dengan cara seperti ini, maka peserta didik dapat mengemas mata pelajaran pilihan yang akan ditempuhnya sesuai dengan antisipasi peran dan studi lanjutan setelah mereka lulus.

Dengan arah dan tujuan pendidikan sebagaimana tersebut diatas, di Kabupaten Indragiri Hulu harus mampu mengakomodasikan berbagai pandangan dan pendapat secara selektif, sehingga terdapat keterpaduan dalam konsep pengembangannya.

Beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pengembangan madrasah swasta di Kabupaten Indragiri Hulu, antara lain:

- 1) *Membangun prinsip kesetaraan* antara sektor pendidikan madrasah dengan sektor pendidikan (di luar madrasah), dan dengan sektor-sektor

lainnya. Kehadiran sistem pendidikan madrasah harus senantiasa dimaknai sebagai adanya keharusan untuk bersama-sama sistem yang lainnya mewujudkan cita-cita masyarakat. Hakikat eksistensi adalah ko-eksistensi. Pendidikan madrasah bukan sesuatu yang secara eksklusif terpisah dari sistem sosialnya. Pendidikan madrasah sebagai sistem merupakan sistem terbuka yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya.

- 2) *Prinsip perencanaan pendidikan.* Oleh karena manusia dan masyarakat berubah, mengalami perubahan yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, baik yang dapat diterima maupun yang harus ditolak, maka pendidikan juga dituntut untuk cepat tanggap atas perubahan yang terjadi dan melakukan upaya yang tepat dan secara normatif sesuai dengan cita-cita masyarakatnya. Pendidikan madrasah bersifat progresif, tidak resisten terhadap perubahan, akan tetapi mampu mengendalikan arah perubahan itu. Pendidikan madrasah di kabupaten indragiri Hulu harus mampu mengantisipasi perubahan itu.
- 3) *Prinsip rekonstruksionis.* Dalam kondisi masyarakat yang menghendaki perubahan mendasar, artinya juga perubahan dengan skala besar berdasarkan gagasan besar, maka pendidikan madrasah juga harus mampu menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh perusahaan besar tersebut. Paham rekonstruksionis mengkritik pandangan pragmatis sebagai suatu pandangan yang cocok untuk kondisi yang relatif stabil. Pendekatan pemecahan masalah bersifat lebih

berorientasi masa kini, sedangkan pendekatan rekonstruksionis lebih berorientasi masa depan dengan tetap berpijak pada kondisi sekarang.

- 4) *Prinsip pendidikan berorientasi pada peserta didik.* Dalam memberikan pelayanan pendidikan, sifat-sifat peserta didik yang bersifat umum maupun spesifik harus menjadi pertimbangan. Layanan pendidikan untuk kelompok usia anak berbeda dengan untuk remaja dan dewasa. Pendekatan pendidikan untuk anak di daerah terpencil tidak dapat disamakan dengan untuk anak perkotaan. Termasuk dalam hal ini adalah perlunya perlakuan khusus bagi kelompok ekonomi lemah, berkelainan fisik atau mental.
- 5) *Prinsip pendidikan multibudaya.* Sistem pendidikan madrasah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayaninya bersifat plural, dan oleh karenanya pluralisme perlu menjadi acuan yang tak kalah pentingnya dengan acuan-acuan yang lain. Pluralisme merupakan faham yang menghargai perbedaan, dan akan baik bila pendidikan madrasah dapat mendayagunakan perbedaan tersebut sebagai dinamika yang bersifat konstruktif, apalagi diikat oleh kesamaan pandang ideologi.
- 6) *Prinsip Pendidikan global.* Pendidikan madrasah di kabupaten Indragiri Hulu harus mampu berperan dalam menyiapkan peserta didik dalam konstelasi masyarakat global, dengan tetap mewajibkan untuk

“melestarikan” karakter agamis-patriotis. Pembinaan karakter agamis-patriotis tetap relevan dan bahkan harus dilakukan.

e. Pengembangan Nilai Pendidikan pada madrasah swasta Di Kabupaten Indragiri Hulu.

Selain mempedomani prinsip-prinsip dasar di atas, pengembangan madrasah swasta di kabupaten Indragiri Hulu memerlukan pada landasan nilai-nilai pendidikan (*educational values*) yang akan dijadikan sebagai karakter dasar insan pendidikan. Tentu saja, dalam pencapaiannya perlu situasi yang kondusif selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk itulah, ke depan madrasah swasta di kabupaten Indragiri Hulu didesain untuk dapat menciptakan dimensi-dimensi belajar secara efektif dengan memperhatikan :

1) Nilai-nilai Pendidikan di Madrasah di Kabupaten Indragiri Hulu.

Pada dasarnya madrasah swasta di Indragiri Hulu dibangun atas adanya keinginan bersama untuk *bertafaqquh fi al-din*. Keinginan ini merupakan nilai pokok yang melandasi kehidupan dunia madrasah. Pernyataan yang sederhana, tetapi mampu mentransformasikan potensi dan menjadikan madrasah sebagai *agent of change* bagi perubahan kualitatif kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Ada 6 (enam) nilai-nilai pendidikan yang perlu dikembangkan di madrasah. Enam nilai tersebut adalah :

a) Iman dan takwa kepada Allah SWT.

- b) Menimba ilmu secara terus menerus dan istiqamah dalam usaha mengaktualisasikan potensi diri.
 - c) Tawakal dalam arti menerima dan menghormati diri-sendiri.
 - d) Menghormati dan memperhatikan orang lain beserta hak-hak mereka,
 - e) Bertanggungjawab terhadap masyarakat.
 - f) Bertanggungjawab terhadap alam sekitar.
- 2) Dimensi-dimensi Belajar yang Efektif dalam madrasah swasta

Kondisi-kondisi tertentu sebuah lembaga pendidikan menentukan performa akademik siswa. Konsistensi guru, jadwal pelajaran yang terstruktur, pengajaran yang menantang secara intelektual, lingkungan yang berorientasi kerja, konsentrasi pada hal terbatas dalam setiap jam pelajaran, komunikasi yang maksimal antara guru dan murid, menyimpan data individual anak (*record-keeping*), keterlibatan orang tua, masyarakat dan suasana yang positif merupakan faktor-faktor kondisional yang mempengaruhi prestasi akademik siswa.

Empat faktor lain yang tak kalah penting adalah adanya rasa senang yang dimiliki siswa terhadap madrasah, ekspektasi yang tinggi, perhatian dan sikap adil seorang guru, dan hubungan yang positif antar sesama teman.

f. Arah dan Kebijakan Pengembangan Madrasah Swasta di Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengamati data dan fenomena perkembangan madrasah di Inhu, pengaturan sistem pendidikan madrasah di kabupaten Indragiri Hulu perlu mengambil beberapa arah dan kebijakan di antaranya :

1) **Pembenahan Serta Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan pada madrasah swasta.**

Banyak dijumpai keberadaan madrasah pada saat ini belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pembelajaran yang ideal misalnya, banyak sekolah yang tidak memiliki lapangan olah raga, ruang laboratorium, ruang bimbingan dan penyuluhan ruang komputer, ruang praktek, ruang keterampilan, ruang kesenian, ruang laboratorium bahasa, dan sebagainya.

Disamping itu, banyak pula dijumpai kelas-kelas yang tidak sesuai antara banyaknya jumlah siswa dengan ukuran kelas yang dimiliki, sehingga proses belajar mengajar berlangsung kurang efektif, guru merasa beban terlalu berat untuk mengontrol siswa, mengoreksi hasil ujian, mengkoordinasi penugasan individu.

Dari wawancara dengan beberapa kepala sekolah diperoleh informasi bahwa, apabila sekolah mempunyai cukup ruang pemanfaatannya kurang efektif misalnya pemanfaatan ruang bimbingan, ruang UKS, diadakan sekedar sebagai asesoris saja, ruang laboratorium tersedia

tetapi isinya tidak terlampau bermakna, disamping perabotnya kurang memadai.

- 2). Arah Kebijakan Program Madrasah Swasta dengan Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan.

Selama masyarakat Indragiri Hulu masih kurang begitu peduli terhadap perkembangan lembaga sekolah. Menurut penuturan beberapa guru madrasah diperoleh informasi bahwa pada umumnya masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa dengan membayar uang sekolah, mereka merasa sudah cukup peran sertanya terhadap sekolah.

Tanggung jawab perkembangan pendidikan seluruhnya diserahkan pada sekolah. Lebih dari itu masih banyak yang beranggapan bahwa dengan adanya komite sekolah cukuplah mereka yang duduk dalam kepanitiaan berkewajiban mengembangkan pendidikan di sekolah yang bersangkutan.

Bagi mereka yang tidak duduk dalam kepanitiaan cukup membayar uang iuran saja. Bagi pihak sekolah sendiri kadang tidak tahu apa yang dilakukan untuk melibatkan orang tua secara keseluruhan. Begitu pula sekolah belum tahu bagaimana menjalin kerja sama dengan masyarakat yang lebih luas termasuk masyarakat dan dunia usaha, masyarakat asosiasi profesional dan sebagainya.

Tanggung jawab keberhasilan sekolah sebenarnya bukan hanya terlatak pada pihak sekolah saja. Keberhasilan sekolah merupakan

tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah dan sekolah. Dengan peran serta seperti itu diharapkan pembenahan sistem pendidikan terintegrasi dengan komunitas di sekitarnya.

Disamping peran serta dari pemerintah, sekolah sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat luas tanpa dukungan masyarakat luas penyelenggaraan sekolah tersebut akan terasa lebih berat. Yang dimaksudkan masyarakat di sini tidak terbatas hanya orang tua saja, tetapi juga termasuk masyarakat dunia usaha, tokoh masyarakat di lingkungan sekitar, masyarakat profesional dan lain sebagainya.

g. Peranan Yayasan dalam Penataan Madrasah Swasta Sebagai Lembaga Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Pengembangan sistem Pendidikan pada madrasah perlu dikembangkan secara terpadu dengan menempatkan nilai-nilai Islam sebagai semangat yang mendasari semua ikhtiar pendidikan dengan Konsep :

- 1) Konsep Penataan suatu pendidikan selain berpedoman pada kebijakan umum dalam dunia pendidikan ,maka konsep penataan pendidikan pada tempat tertentu juga harus tertuang dalam lembaga yayasan yang mengelola pendidikan itu sendiri. Dalam artian ada program unggulan yang di sajikan oleh madrasah itu sendiri.
- 2) Yayasan harus memperhatikan pembangunan secara menyeluruh di mulai dengan penetaan pembangunan, tata ruang, tata letak

bangunan, pembagian ruang belajar, kantor dan lainnya mesti merupakan satu kesatuan yang menciptakan kenyamanan dan cerminan lingkungan pendidikan.

- 3) Yayasan harus memikirkan peningkatan mutu pendidikan pada madrasah yang nantinya diharapkan mampu mewujudkan madrasah unggulan yang menjadi harapan masyarakat dengan dua keung-
yakni pendidikan agama dan pendidikan umum.
- 4) Pembinaan lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan tidak saja melalui Departemen Agama, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah setempat dan masyarakat, karena peserta didiknya adalah putra-putri daerah yang diharapkan akan berperan dalam pembangunan daerahnya

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat memberikan respon baik terhadap pentingnya jati diri madrasah swasta yang dikelola oleh yayasan sebagai lembaga pendidikan Islam. Simpulan respon masyarakat menyatakan bahwa madrasah swasta tidak mungkin dipisahkan dari masyarakat dan momentum religiusitas dan dinamika politik yang menyertai kelahirannya. Pendeknya, upaya pengembangan madrasah tidak dapat di lepaskan dari aspek kesejarahan madrasah itu sendiri. Sebab jika itu terjadi hanya akan mempelebar ruang pemisahan kebutuhan jenis lembaga pendidikan antara milik pemerintah dengan milik masyarakat, dan pada gilirannya memposisikan pendidikan pada madrasah swasta menjadi terasing.
2. Sedangkan pada ranah yang lebih praktis, sistem pendidikan pada madrasah swasta yang tetap konsisten dalam naungan yayasan masih tetap menjadi kebutuhan masyarakat dan mewakili kepentingan jati diri dari sebuah lembaga pendidikan Islam harus lebih dikukuhkan dan diupayakan supaya sejajar dengan lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah.
3. Sebagaimana halnya pandangan masyarakat terhadap keberadaan madrasah swasta di Kabupaten Indragiri Hulu termasuk karakteristik madrasahpun sangat tinggi. Masyarakat menilai bahwa sebagai lembaga pendidikan berbasis

masyarakat, maka isi pendidikan di madrasah idialnya adalah nilai kultural yang telah hidup dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Karena itu ketika madrasah swasta di kabupaten Indragiri Hulu ingin mendapat respon yang baik dari masyarakat madrasah harus mempunyai tujuan dan visi yang jelas dan dinaungi oleh yayasan yang mempunyai integritas yang baik pula.

4. Pemerintah sebagai pengayom semula lembaga pendidikan harus memberikan jaminan perlindungan yang jelas sesuai dengan UU No 20 tahun 2003 tanpa harus menegerikan madrasah-madrasah swasta yang ada di kabupaten Indragiri hulu.
5. Cara pandang masyarakat kabupaten Indragiri Hulu terhadap Reposisi madrasah swasta perlu juga dirubah dengan pandangan bahwa madrasah bukanlah lembaga pendidikan yang hanya mendidik siswa untuk ilmu-ilmu agama saja akan tetapi madrasah memberikan peluang juga bagi anak didik untuk mendapatkan pendidikan umum.
6. UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No 16 Tahun 2001 memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengembangkan lembaga pendidikan oleh karena itu masyarakat memberikan respon yang kurang baik terhadap keberadaan yayasan dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan, untuk itu perlu pembenahan dan dicarikan solusinya. Yayasan belum banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan madrasah yang dinaunginya, sehingga madrasah berjalan dengan sendirinya tanpa bimbingan dari yayasan.

B. Saran-Saran

Penguatan jati madrasah harus dilakukan dengan menjadikan madrasah swasta di kabupaten Indragiri Hulu sebagai lembaga unggulan dan mutu lulusan yang kompetitif.

Upaya yang dilakukan adalah membentuk sebuah lembaga pendidikan formal dengan spesialisasi ilmu-ilmu keislaman di bawah pengelolaan dan pembinaan Yayasan dan Pemerintah.

Lembaga ini tidak masih dengan pola rekrutmen siswa yang ketat karena dipersiapkan secara khusus sebagai pusat keunggulan dan pendidikan kader-kader muslim yang cerdas dan tangguh.

Seluruh komponen pendidikannya harus dicukupi secara memadai oleh yayasan dan Pemerintah. Untuk tingkat menengah, output yang dihasilkan, diharapkan bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atas biaya Pemerintah.

Hal ini didasarkan atas alasan bahwa madrasah yang ada saat ini belum mampu mencitrakan jati dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang unggul dengan mutu lulusan yang kompetitif.

Kepada pihak yayasan supaya memahami fungsi dan kerja yayasan, dan kepada pihak Kementerian Agama Islam supaya tidak membedakan perlakuan terhadap sekolah swasta dengan sekolah negeri.

Begitu juga kepada pemerintahan daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah supaya dapat memberikan bantuan moral dalam

mencukupi pembangunan madrasah swasta di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya pembangunan sarana dan prasarana. Dan untuk kepala madrasah supaya dapat mengelola dan memimpin madrasah dengan baik.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah S.W.T yang telah memberikan nikmat, kekuatan, semangat, motivasi serta pemikiran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan tesis ini tidak bisa lepas dari kesalahan dan kekeliruan.

Hal itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan.

Akhirnya penulis hanya berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Wállahu a'lam bi al Shawab*

DAFTAR PUSTAKA

- Abrasyi, Muhammad 'Athiyah, *Tarbiyah Al-Islamiah*, (Kairo : Dar-al Fiqr, t.t)
- Al-Balali, Abdul Hamid. *Madrasah Pendidikan Jiwa*, Gema Insani, Jakarta, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, 1998.
- Astori, Muhammad. *Psikologi Pembelajaran*. CV. Wacana Prima, Bandung, 2007.
- Aziz, Abdul, *Perkembangan Madrasah : Suatu Tinjauan Historis Politik dalam jurnal Penelitian pendidikan Agama dan keagamaan Edukasi*. Vol 4 (2) , 2006.
- Azra, Azzumardi. 2008. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Melinium Baru*. Jakarta : logos, 2008.
- B. Sandjaya, Albertus Heriyanto. *Panduan Penelitian*, Prestasi Pustaka Publish, 2006.
- Bambang Dwiloka. Rati Riana, *Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Bogdan, Robert C. 1990. *Riset Kualitatif Untuk Pendidikan, Pengantar ke Teori dan Metode* (Ali Bahasa oleh Munandir, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, UT).
- Brannen, Julia. 2002. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cetakan Ke Empat), 2002.
- Burhan Bungin. *Dimensi Metodologi dalam Penelitian Sosial*
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002)
- Darmu'in, *Prospek Pendidikan Islam di Indonesia: Suatu Telaah Terhadap Pesantren dan Madrasah dalam PBM – PAI di sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Daulay, Haidar Putra, *Historis dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989)

- Departemen Agama, "*Pedoman Penyelenggara Mata Pelajaran Umum di Madrasah*", Departemen Agama Jakarta, 2004.
- Departemen Agama, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, "*Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru)*", Jakarta, 2005.
- Departemen Agama RI, Dirjen Kelambagaan Agama Islam, "*Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam*", Jakarta, 2003.
- Dhofier, Zamakhsyari, Tradition & Change In Indonesian Islamic Education, Editor:A.G. Muhaimin, (Jakarta: Baliitban Depag RI, 1996)
- Djamaluddin, Abdullah Aly, *Kapekta selekta Pendidikan Islam*, Pustaka Setia, 1999.
- Echols, John M., Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia, 1988)
- Fajar, A. Malik, Madrasah dan Tantangan Modernitas, Bandung: Mizan, 1999)
- Gibb, H.A.R and JH Kramers, Shorter Encyclopedia of Islam, (Netherlands : Leiden, 1991)
- Grafindo Persada, 2004)Shihab,M, Quraish, *Tafsir al-Misbah:Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2002Habsyi, al-Husin,Kamus al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia, (Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1991)
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Jilid I, (Yogyakarta: Andi, 2000)
- Hadjar, Ibnu, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Hasan, Yusuf A., et. al., Pedoman Pengawasan untuk Madrasah dan Sekolah Umum, (Jakarta: Mekar Jaya, 2002)
- Isjoni. *Pokok-pokok Pikiran Pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu*, UNRI PRESS, 2007.
- Lapidus, Ira M., A History of Islamic Societies, (Melbourne: Cambridge University Press, 1988)Imron, Ali, *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Lexi J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Maksum, H. *Madrasah Sejarah & Perkembangannya*. Penerbit Logos Wacana, Ciputat, 1999.
- Mas'ud, Abdurrahman, Antologi Studi Agama dan Pendidikan, (Semarang: Aneka Ilmu, 2004)

- Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999)
- Muhaimin, et.al, *Paradigma Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002)
- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), cet.7
- Mustofa Bisri, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis Optimus*, Jogjakarta, 2008.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) Margono S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta. Jakarta, 2004.
- Nana Sudjana, dan Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan* (Bandung ; Sinar Baru Algensindo, Cetakan Kedua, 2001)
- National. S, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Nurudin, *Dasar-Dasar Penulisan*, UMM Pres Malang, 2010.
- Pemerintahan RI *Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Fokusmedia, Bandung 2003.
- Pemerintah RI *Standar Nasional Pendidikan (SNP) Peraturan Pemerintah Tahun 2005*, Fokusmedia, Bandung 2005.
- Pohan, Rusdin. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Ar-Rijal Istitute dan Lanarka, Jojakarta, Tahun 2007.
- Pratiwi, *Panduan Penulisan Skripsi*, Tugu Yokyakarta, Tahun 2009.
- Sagala, Syaiful *Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan*, Alfabeta Bandung, 2008.
- Saylor, John Galen, *Curriculum Planning For Better Teaching and Learning*, (Belmont California: Wadsworth Publishing Company, 1954)
- Shadily, Hasan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Shaleh, Abdul Rachman, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, (Jakarta : PT. Raja
- Soetomo, Westi. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Soenarjo, dkk., *Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Depag RI, 2003)

- Sudirman N, dkk., Ilmu Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1992), cet. keenam
- Sudjana, Nana, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, (Bandung: Suara Baru, 1989)
- _____ dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung : Sinar Baru, 1989)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 2006)
- Suryadi, Ace dan Dasim Budimansyah, Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru, (Bandung: PT. Genesindo, 2004)
- Suryadi, Ace dan HAR Tilaar, Analisis Kebijakan Pendidikan Pendidikan, (Bandung: Rosda Karya, 1993)
- Susiasumantri, Jujun S., Ilmu dalam Perspektif, (Jakarta: Gramedia. 1999)
- Suyanto, Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa, (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2001)
- Syani, Abdul, Sosiologi : Skematika, Teori dan Terapan, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994)
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta 2004.
- Sudarman, Damri, Dr, *Menjadi Penelitian Kuantitatif*, Penerbit Pustaka Setia Bandung.
- Thamrin, *Husni Dinamika Sosial Keagamaan*, Yayasan Pusako Riau Kerja sama dengan Lembaga dan Pengembangan UIN SUSKA RIAU.
- Thoha, Chabib, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan bagian III Pendidikan Disiplin Ilmu*, Penerbit PT. Imperial Bhakti Utama
- Tim Penulis, Tips dan Cara Menyusun Skripsi Tesis Disertasi, Shira Media, Jogjakarta 2009
- Tim Penyusun KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. IX
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2003)
- Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang *Yayasan*.
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.

Wahab, Rochidin, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Alfabet, 2004)

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Jakarta 1999.